



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

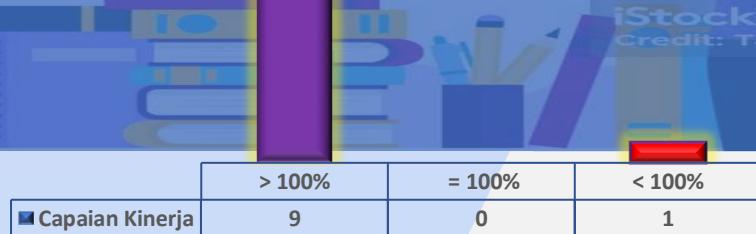


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENDIDIKAN
2025

IKHTISAR EKSEKUTIF



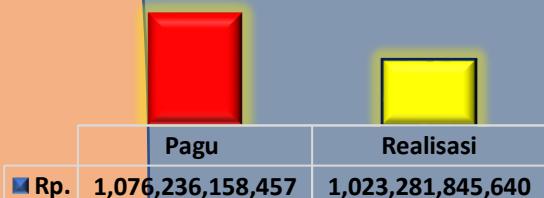
Capaian IKU Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024
(120,1%)



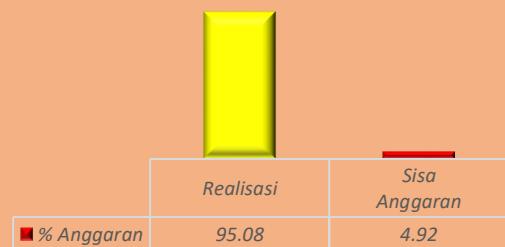
Analisa Efesiensi Sumber Daya dengan Efektivitas Program
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Realisasi Kinerja Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Persentase Realisasi Anggaran
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024





Grafik
Realisasi Capaian Kinerja, Efesiensi Sumberdaya dan Efektivitas Program
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



EA : Efesiensi Anggaran/Sumber daya

RK : Realisasi Capaian Kinerja

EP : Efektivitas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

IKU.S1 sd 11 : Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 sd 11

IKU.S1 : SMA/SMK/SLB Negeri Terakreditasi Minimal B

IKU.S2 : SMKN Terevitalisasi

IKU.S3 : Lulusan SMAN yang diterima di PTN/Kedinasan

IKU.S4 : Lulusan SMKN Yg Bekerja di DUDI

IKU.S5 : PTK yg Mengikuti diklat

IKU.S6 : APK SMA/SMK/MA

IKU.S7 : APM SMASMK/MA

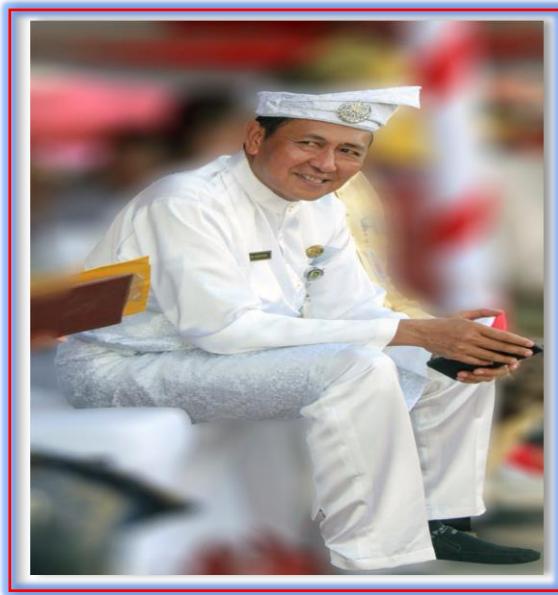
IKU.S8 : APK SLB

IKU.S9 : Rasio Siswa Perkelas

IKU.S10 : Nilai SAKIB

IKU.S11 : IKU Dinas Pendidikan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, dengan izin Allah SWT Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disajikan dalam bentuk Tabel, Grafik beserta penjelasannya.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran objektif tentang tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berisi capaian kinerja yang dicapai dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 dan diseleraskan dengan perbandingan kemajuan capaian akhir Resntra serta menghitung pencapaian antara inidikator kinerja dan keuangan serta pencapaian perbandingan antara efektivitas dan efesiensi sumber daya yang digunakan.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Laporan kinerja ini juga memuat hasil analisis pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja instansi.

Dalam Laporan Kinerja ini, kami berupaya menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar

lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan serta penyempurnaan perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang pendidikan di tahun mendatang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat untuk para pihak demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

Tanjungpinang, Februari 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	6
1.5. Sumber Daya Dinas Pendidikan	9
1.5.1. Sumber Daya Manusia.....	6
1.5.2. Tenaga pendidik dan Kependidikan	10
1.5.3. Angka Putus Sekolah	18
1.5.4. Satuan Pendidikan	18
1.5.5. Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah.....	22
1.5.6. Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Sekolah Menengah.....	23
1.5.7. Sumber Daya Aset	24
1.6. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	22
1.7. Kependudukan.....	25
1.8. Isu Strategis	27
1.8. Sistematika Penulisan	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1. Telaah Visi dan Misi	31
2.2. Rencana Kerja	38
2.3. Perjanjian Kinerja	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. Capaian Kinerja organisasi	42
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	42
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	44
3.1.3. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Utama	47
3.1.3.1. Capaian Kinerja Indikator Kepala Daerah.....	47
3.1.3.2 Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	51
3.1.3.2.1. Meningkatnya Mutu Pendidikan.....	51
3.1.3.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan.....	80
3.1.3.2.3. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi	99
BAB IV PENUTUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kepala Sekolah Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	11
Tabel 1.2	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	12
Tabel 1.3	Jumlah Tenaga Pendidik Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	15
Tabel 1.4	Jumlah Tenaga Kependidikan Pada Pendidikan Menengah dan Kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	15
Tabel 1.5	Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Status Sertifikasi Sekolah Menengah dan PK Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	17
Tabel 1.6	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	19
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.....	35
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	41
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	41
Tabel 1.6	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	43
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.....	44
Tabel 3.1	Predikat nilai capaian kinerja	43
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	44
Tabel 3.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	45
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	46
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	47
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Kinerja SMA/MA/SMK Negeri Yang Terakreditasi Minimal B Tahun 2024	52
Tabel 3.7	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	54
Tabel 3.8	Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	54

	di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	57
Tabel 3.9	Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024	58
Tabel 3.10	Analisa Capaian Kinerja SMKN yang terevitalisasi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	59
Tabel 3.11	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi SMK Negeri Terevitalisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	59
Tabel 3.12	Analisa Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja SMK Terevitalisasi Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	61
Tabel 3.13	Analisa Pencapaian Kinerja Lulusan SMA Yang Melanjutkan Ke Pendidikan Tinggi/Kedinasan Tahun 2024	63
Tabel 3.14	Jumlah Lulusan Siswa SMAN Pada PTN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	64
Tabel 3.15	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMAN yg Melanjutkan Ke Perguraun Tinggi/Sekolah Kedinasan di Provinsi Kepulauan RiauTahun 2024	67
Tabel 3.16	Analisa Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja Lulusan SMA Yang Melanjutkan ke PTN Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	68
Tabel 3.17	Analisa Pencapaian Kinerja Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja di IDUKA Tahun 2024	69
Tabel 3.18	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	72
Tabel 3.19	Analisa Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Capaian Kinerja Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	73
Tabel 3.20	Analisa Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024	74
Tabel 3.21	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	76
Tabel 3.22	Analisa Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Capaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	77
Tabel 3.23	Program dan Dukungan Anggaran Indikator Kinerja Meningkatnya Mutu Pendidikan Tahun Anggaran 2024	77
Tabel 3.24	Analisa Pencapaian Kinerja Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2024	81
Tabel 3.25	Analisa Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kepulauan	

	Riau Tahun 2024	82
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	82
Tabel 3.27	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	84
Tabel 3.28	Analisa Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja APK SMA/MA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	84
Tabel 3.29	Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Riau Rahun 2024	85
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	86
Tabel 3.31	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	87
Tabel 3.32	Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja APM SMA/MA/SMK Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	87
Tabel 3.33	Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	88
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	89
Tabel 3.35	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	90
Tabel 3.36	Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja APK SLB Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	93
Tabel 3.37	Jumlah Siswa dan Ruang Kelas Belajar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	93
Tabel 3.38	Analisa Pencapaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	93
Tabel 3.39	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	95
Tabel 3.40	Tingkat Efektivitas dan Efesiensi Sasaran Kinerja Rasio Siswa Perkelas Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	95
Tabel 3.41	Program dan Dukungan Anggaran Indikator Kinerja Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun Anggaran 2024	96

Tabel 3.42	Program dan Dukungan Anggaran Indikator Kinerja Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun Anggaran 2024	100
Tabel 3.43	Analisis Perbandingan Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	103
Tabel 3.44	Program dan Dukungan Anggaran Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	105
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	107
Tabel 4.1	Analisis Perbandingan Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024	110

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status Tahun 2024	9
Grafik 1.2	Prosentase Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ...	9
Grafik 1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tahun 2024	9
Grafik 1.4	Persentase PNS Berdasarkan Golongan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tahun 2024	10
Grafik 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	10
Grafik 1.6	Prosentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	10
Grafik 1.7	Persentase Jenis Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	11
Grafik 1.8	Persentase Perbandingan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	13
Grafik 1.9	Persentase Tenaga Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	13
Grafik 1.10	Persentase Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	14
Grafik 1.11	Penyebaran Tenaga Pendidik Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	14
Grafik 1.12	Penyebaran Tenaga Kependidikan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	14
Grafik 1.13	Persentase Penyebaran Tenaga Pendidik Berdasarkan Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	14
Grafik 1.14	Persentase Penyebaran Tenaga Kependidikan Berdasarkan Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	15
		16

Grafik 1.15	Percentase Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Atas Negeri, Menengah Kejuruan Negeri dan PK Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	16
Grafik 1.16	Menengah Atas Negeri, Menengah Kejuruan Negeri dan PK Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	16
Grafik 1.17	Percentase Tenaga Pendidik Berdasarkan Sertifikasik Pada Satuan Pendidikan Menegah dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	17
Grafik 1.18	Percentase Tenaga Pendidik Berdasarkan Sertifikasi dan Non Sertifikasi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah dan PK Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	17
Grafik 1.19	Angka Putus Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024	18
Grafik 1.20	Sebaran Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	19
Grafik 1.21	Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	19
Grafik 1.22	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Batam Tahun 2024	20
Grafik 1.23	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2024	20
Grafik 1.24	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Karimun Tahun 2024	20
Grafik 1.25	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Bintan Tahun 2024	21
Grafik 1.26	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Anambas Tahun 2024	21
Grafik 1.27	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Lingga Tahun 2024	21
Grafik 1.28	Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Natuna Tahun 2024	22
Grafik 1.29	Rasio Ketersedian Sekolah (Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan riau Tahun 2022 sd 2023	23
Grafik 1.30	Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	23

Grafik 1.31	Rasio Pendidik terhadap Peserta Didik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	24
Grafik 1.32	Persentase Kondisi Aset Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024	26
Grafik 1.33	Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sd 2024	26
Grafik 1.34	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur (16-18 Tahun) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	26
Grafik 1.35	Jumlah Penduduk Disabilitas Berdasarkan Umur (4-18 Tahun) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	27
Grafik 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	47
Grafik 3.2	Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	48
Grafik 3.3	Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	48
Grafik 3.4	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	49
Grafik 3.5	Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	50
Grafik 3.6	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	53
Grafik 3.7	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	51
Grafik 3.8	Capaian Kinerja RLS, HLS dan APS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	51
Grafik 3.9	Capaian Kinerja Akreditasi Minimal B Pada Sekolah Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	53
Grafik 3.10	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024	53
Grafik 3.11	Sebaran Akreditasi Sekolah Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.....	54
Grafik 3.12	Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	59
Grafik 3.13	Jumlah Lulusan Peserta Didik SMAN dan Lulusan Peserta Didik Lulus di PTN/Sekolah Kedinasan Tahun 2024	62
Grafik 3.14	Persentase Lulusan Siswa SMAN Pada PTN Tahun 2024	64
Grafik 3.15	Persentase Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	69
Grafik 3.16	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2024	83

Grafik 3.17	Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021- 2024	86
Grafik 3.18	Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2024	89
Grafik 3.19	Jenis Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2024	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja, laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran pemerintah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan, sakip merupakan sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan mampu mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berweibawa. Manfaat dari penyusunan Laporan kinerja agar instansi

pemerintah mampu mendorong meyelenggarakan tugas dan fungsi secara baik dan benar (good governance), mendorong tumbuhnya pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKj, disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
2. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Menjadi bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjadikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

5. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
6. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;
7. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di dalam melaksanakan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, yaitu:

1. Sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai,
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan.
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan perbaikan terhadap kinerja yang belum tercapai dalam rangka melakukan serta menentukan berbagai analisis strategi, kebijakan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja organisasi serta menentukan Langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 antara lain sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan OPD dengan tipologi A. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,

- Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pembinaan Ketenagaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas, untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas Pendidikan mempunyai rincian tugas:

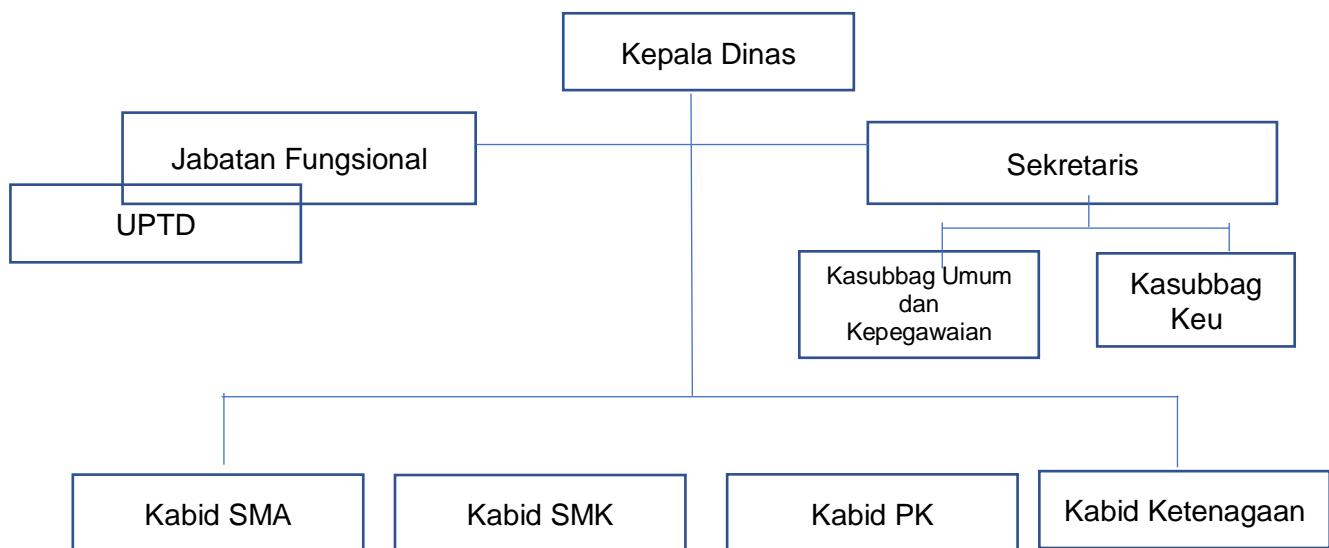
- a. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan rencana strategis Dinas Pendidikan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan;
- c. membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan;
- e. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- g. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- i. merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pembinaan Ketenagaan;
- j. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah.
- k. melaksanakan pemantauan dan

- pembinaan tugas Dinas Pendidikan;
- I. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan; m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- g. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- h. Cabang Dinas;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau

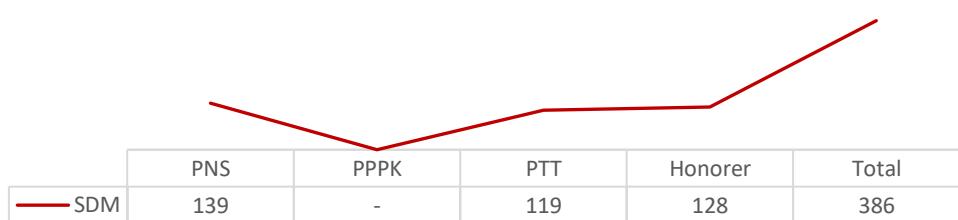


1.5. Sumber Daya Dinas Pendidikan

1.5.1. Sumber Daya Manusia

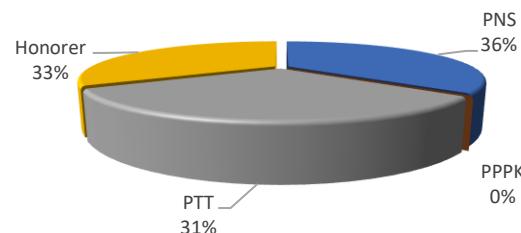
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 tercatat sebanyak 386 orang, terdiri atas PNS 139, PTT 119 dan sisanya honorer.

Grafik 1.1
Jumlah Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Status
Tahun 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2024

Grafik 1.2
Prosentase Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



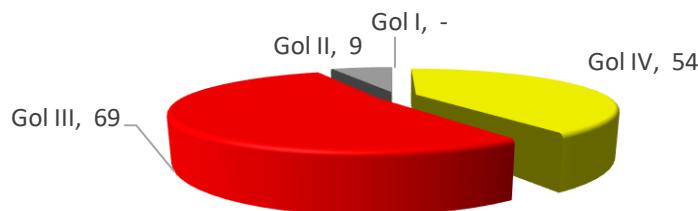
Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2023

Grafik 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



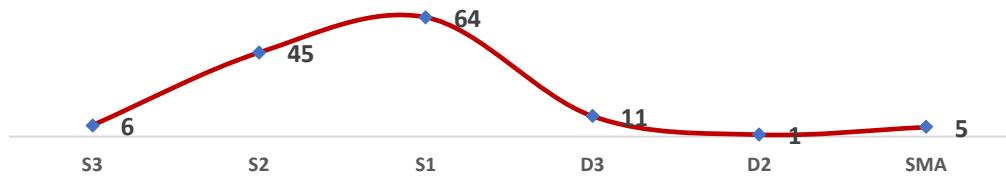
Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri, 2023

Grafik 1.4
Persentase PNS Berdasarkan Golongan
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



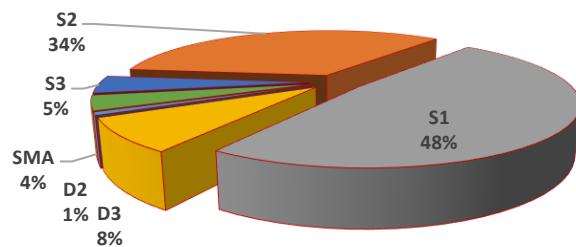
Sumber : Disdik Kepri 2024

Grafik 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2024



Sumber : Disdik Kepri 2024

Grafik 1.6
Persentase Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2024



Sumber : Disdik Kepri 2024

1.5.2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Definisi guru menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yakni pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada, baik dalam pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Guru harus mampu

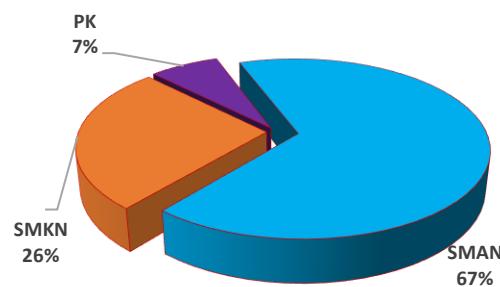
menjunjung tinggi etika, mengembangkan, dan menerapkan keutamaan yang menyangkut kebudayaan dan keilmuan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, pendidikan harus dapat mengembangkan sikap dan karakter seseorang agar dapat menjadi warga yang bertanggung jawab untuk masa depan. Dari sini sebenarnya terlihat ya, sistem pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada nilai tidak menjamin berkembangnya potensi di luar nilai akademis

Tabel 1.1
Jumlah Kepala Sekolah
Pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Kepala Sekolah			Jumlah
		SMAN	SMKN	Pendidikan Khusus	
1	2	3	5	5	
1	Batam	29	11	1	41
2	Tanjungpinang	7	5	2	14
3	Bintan	10	4	2	16
4	Karimun	15	5	2	22
5	Lingga	14	4	1	19
6	Anambas	5	4	1	10
7	Natuna	14	5	1	22
	Kepulauan Riau	96	38	10	144

Grafik 1.7
Persentase Jenis Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Dapodik 2024

Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tercatat pada data pokok pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 tercatat pada Pendidikan menengah dan khusus milik Pemerintah sebanyak 6514 dimana jumlah tenaga pendidik berstatus PNS sebanyak 1761 orang dan 2059 berstatus sebagai PPPK. Secara lengkap jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada sekolah menengah negeri dijelaskan pada Tabel 1.2 sbb

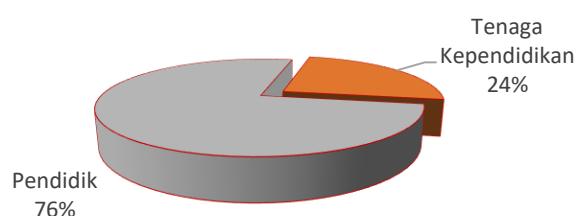
Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Tenaga Pendidik				Jumlah Tenaga Kependidikan			
		PNS	PPPK	Honor	Jumlah	PNS	PPPK	Honor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Batam	557	953	444	1954	16	0	422	438
2	Tanjungpinang	303	292	133	728	27	0	261	288
3	Karimun	209	192	114	515	13	0	130	143
4	Bintan	275	252	174	701	40	0	262	302
5	Natuna	192	153	110	455	35	0	161	196
6	Lingga	166	147	76	387	10	0	128	138
7	Anambas	59	72	65	196	11	0	62	73
	Kepulauan Riau	1761	2059	1116	4936	152	0	1426	1578
	Total					6514			

Sumber : Dapodik 2024

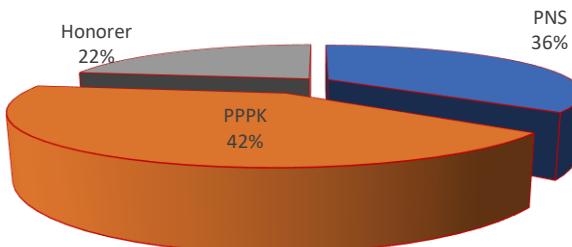
Tabel 1.2 menjelaskan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yg terdaftar pada Data Pokok Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebanyak 6.514, dimana tenaga pendidik tercatat sebanyak 4.936 orang atau setara dengan 76%. Dan tenaga kependidikan tercatat sebanyak 1.578 atau setara dengan 24%. Secara lengkap perbandingan porsentase tenaga pendidik sebagaimana pada Grafik 1.8 sbb :

Grafik 1.8
Persentase Perbandingan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Dapodik 2024

Grafik 1.9
Persentase Tenaga Pendidik Berdasarkan Status Kepegawaian
Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

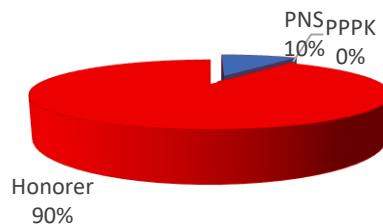


Sumber : Dapodik 2024

Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya wakil/Kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh: Kepala Urusan Kurikulum, Tata usaha, adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola di antaranya administrasi surat menyurat dan pengarsipan,, administrasi Kepegawaian, administrasi Peserta Didik, pengelolaan dana operasional, administrasi Keuangan, administrasi Inventaris ,Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di Laboratorium, pustakawan, petugas kebersihan, penjaga keamanan dan lainnya.

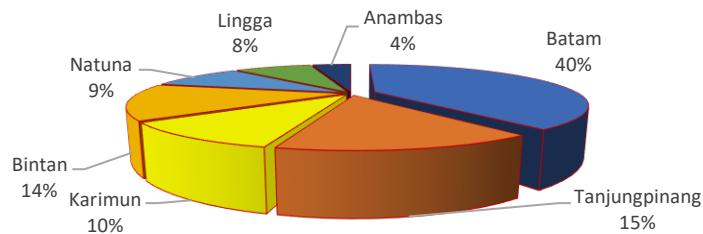
Grafik 1.10 Menunjukkan sebagian besar atau setara 91% tenaga kependidikan di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh tenaga honorer sedangkan sisanya 9% berstatus sebagai PNS. Berikut digambarkan pada gtafik sbb :

Grafik 1.10
 Persentase Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian
 Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
 di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



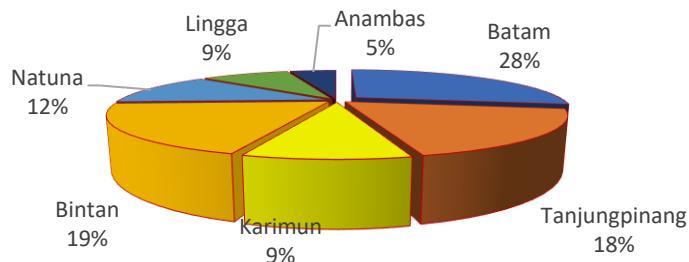
Sumber : Dapodik 2024

Grafik 1.11
 Penyebaran Tenaga Pendidik Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota
 Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus Negeri
 di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



Sumber : Dapodik 2024

Grafik 1.12
 Penyebaran Tenaga Kependidikan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota
 Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Khusus Negeri
 di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



Sumber : Dapodik 2024

Tabel 1.3 dibawah ini menjelaskan bahwa sebanyak 6478 tenaga pendidik yang tercatat pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 3001 tenaga pendidik bekerja di satuan Pendidikan sekolah menengah negeri. Secara lengkap penyebaran tenaga pendidik di jelaskan sbb :

Tabel 1.3
Jumlah Tenaga Pendidik
Pada Pendidikan Menengah, Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Khusus Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Tenaga Pendidik						Jumlah
		SMAN	SMKN	SLBN	SLBS	SMKS	SMAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Batam	1149	779	26	72	610	500	3136
2	Tanjungpinang	343	334	51	7	47	70	852
3	Bintan	289	206	20	8	21	35	579
4	Karimun	450	214	37	35	56	51	843
5	Natuna	343	103	9	0	1	0	456
6	Lingga	310	63	14	0	8	17	412
7	Anambas	117	74	5	0	0	4	200
	Kepulauan Riau	3001	1773	162	122	743	677	6478

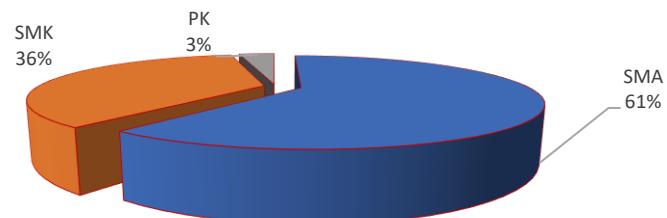
Sumber : Dapodik 2024

Tabel 1.4
Jumlah Tenaga Kependidikan
Pada Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Tenaga kependidikan						Jumlah
		SMAN	SMKN	SLBN	SLBS	SMKS	SMAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Batam	228	207	3	13	129	95	675
2	Tanjungpinang	138	133	17	0	16	20	324
3	Bintan	95	43	5	0	7	8	158
4	Karimun	192	98	12	11	22	12	347
5	Natuna	133	54	9	0	0	0	196
6	Lingga	111	23	4	0	2	6	146
7	Anambas	46	20	7	0	0	1	74
	Kepulauan Riau	943	578	57	24	176	142	1920

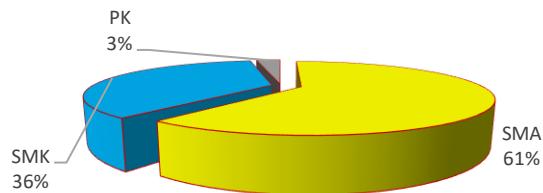
Sumber : Dapodik 2024

Grafik 1.13
Percentase Penyebaran Tenaga Pendidik Berdasarkan Satuan Pendidikan Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



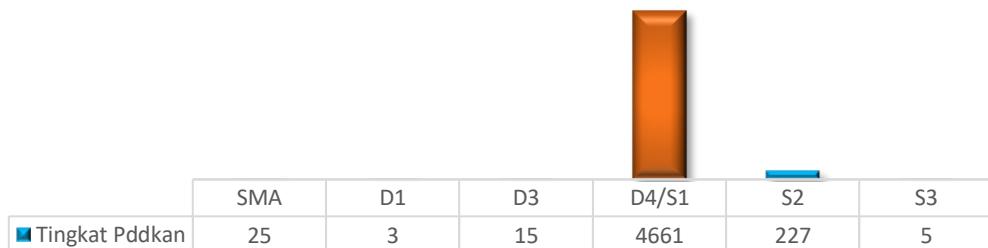
Sumber : Dapodik 2024

Grafik 1.14
 Persentase Penyebaran Tenaga Kependidikan
 Berdasarkan Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024

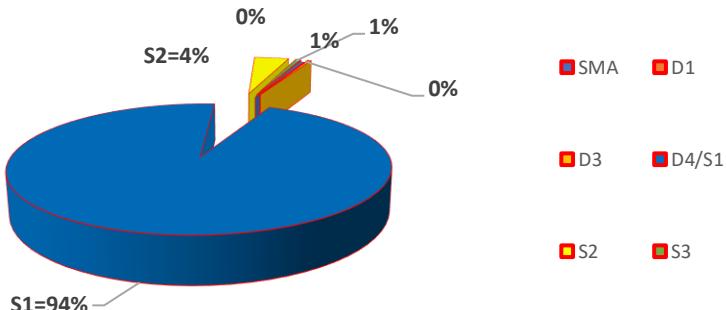


Sumber : Dapodik 2024

Grafik 1.15
 Persentase Kualifikasi Tenaga Pendidik
 Sekolah Menengah Atas Negeri, Menengah Kejuruan Negeri dan PK Negeri
 Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



Grafik 1.16
 Persentase Kualifikasi Tenaga Pendidik
 Sekolah Menengah Atas Negeri, Menengah Kejuruan Negeri dan PK Negeri
 Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024



Sertifikasi Guru atau Sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah.

Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara,

sertifikasi diberikan apabila seorang guru telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

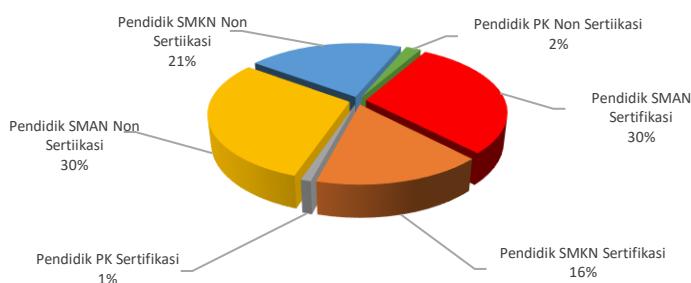
Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Pendidik
Berdasarkan Status Sertifikasi Pada Satuan Pendidikan Menengah dan PK Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Satuan Pendidikan					
		SMAN		SMKN		PK	
		Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Sudah Sertifikasi	Blm Sertifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Batam	568	607	379	409	11	16
2	Tanjungpinang	191	158	202	137	22	29
3	Bintan	189	110	111	98	10	10
4	Karimun	269	196	106	113	17	20
5	Natuna	156	201	47	61	2	7
6	Lingga	158	166	35	32	1	13
7	Anambas	52	69	24	54	0	5
	Kep.Riau	1583	1507	904	904	63	100

Grafik 1.17
Percentase Tenaga Pendidik Berdasarkan Sertifikasik
Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Negeri
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



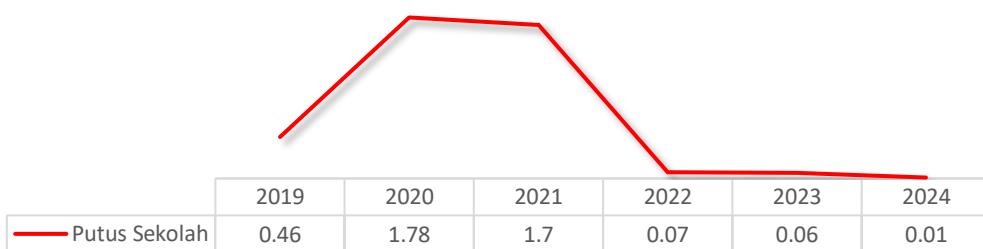
Tabel 1.18
Percentase Tenaga Pendidik Berdasarkan Sertifikasi dan Non Sertifikasi
Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah dan PK Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 202



1.5.3. Angka Putus Sekolah

Dengan membaiknya fasilitas, distribusi PTK, penyebaran dan didukung oleh berbagai program seperti beasiswa, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional siswa dan berbagai program kemudahan lainnya, secara umum angka putus sekolah dari tahun cenderung megalami penurunan, berikut data angka putus sekolah sbb :

Grafik 1.19
Angka Putus Sekolah Di Provinsi Kepulauan Riau
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019-2024



1.5.4. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan dapat berupa sekolah, lembaga, madrasah, atau kampus. Berdasarkan jenjangnya, satuan pendidikan terbagi menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Jumlah penduduk di suatu wilayah berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, luas wilayah menjadi faktor pendukung dalam memprediksi kebutuhan sarana pendidikan dimasa yang akan datang.

Provinsi ini termasuk provinsi berbentuk kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km², dan 58% penduduknya berada di Kota Batam. Dan pada akhir tahun 2023, penduduk Kepulauan Riau sebanyak

2.178.610 jiwa. Berikut penyebaran sekolah menengah dan kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

*Tabel 1.6
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024*

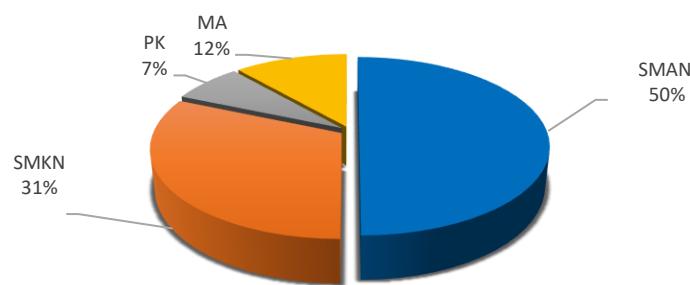
No	Kab/Kota	Jumlah Satuan Pendidikan							Jumlah
		SMAN	SMAS	SMKN	SMKS	PK	PKS	MA	
1	Batam	29	57	11	59	1	8	15	180
2	Tanjungpinang	6	7	5	5	2	2	2	29
3	Bintan	10	6	4	3	2	2	4	31
4	Karimun	16	5	5	4	2	3	6	41
5	Lingga	15	3	4	1	1	0	4	28
6	Anambas	5	1	4	0	1	0	4	15
7	Natuna	14	0	5	0	1	0	5	25
	Kepulauan Riau	96	79	38	72	10	15	40	350

Sumber : Dapodik 2024 dan Kemenag Kepri 2024

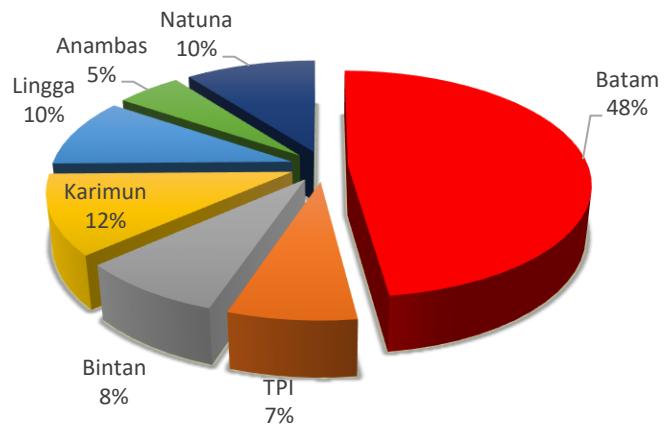
Data menunjukkan bahwa sebanyak 67% satuan pendidikan berstatus sebagai sekolah menengah atas negeri, 26% berstatus sebagai sekolah menengah kejuruan negeri sisanya 7% merupakan sekolah pendidikan khusus.

Seiring dengan misi Kementerian Pendidikan Nasional yang lebih mengedepankan sekolah yang menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki Dunia pasar, kedepan diharapkan adanya peningkatan sekolah kejuruan khususnya pada potensi local yang dapat dikembangkan menjadi sekolah unggulan di masing masing wilayah. Secara lengkap dijelaskan pada grafik dibawah ini.

*Grafik 1.20
Sebaran Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024*



Grafik 1.21
Sebaran Satuan Pendidikan Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

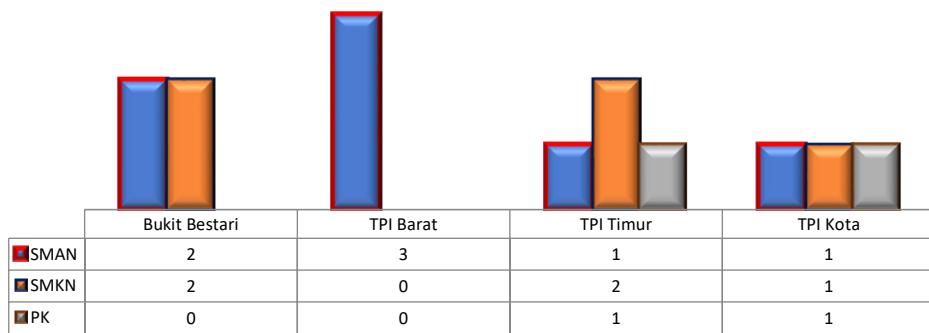


Grafik 1.22
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Batam Tahun 2024

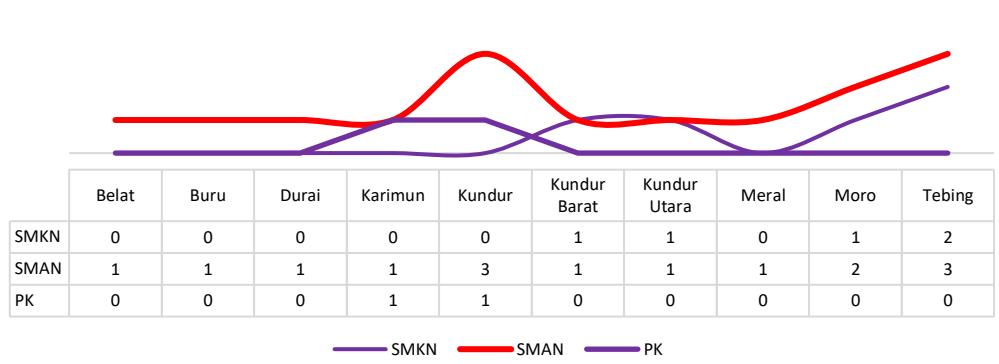


Sumber : Dapodik 2024

Grafik 1.23
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2024



*Grafik 1.24
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri
Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Karimun Tahun 2024*

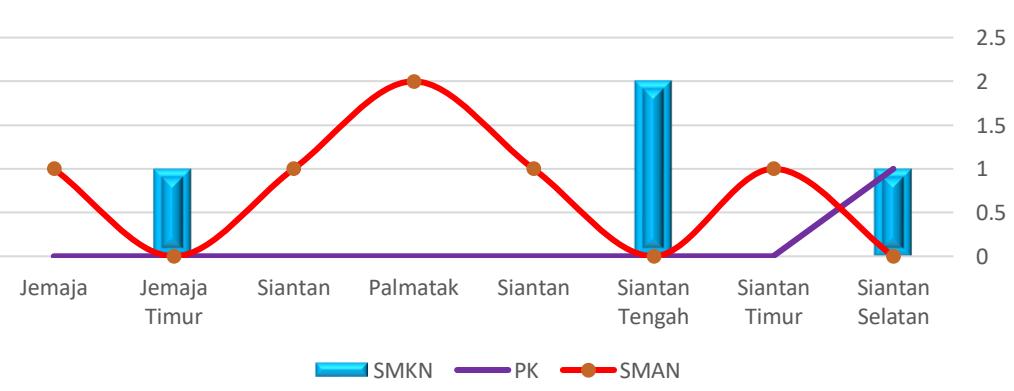


*Grafik 1.25
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri
Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Bintan Tahun 2024*

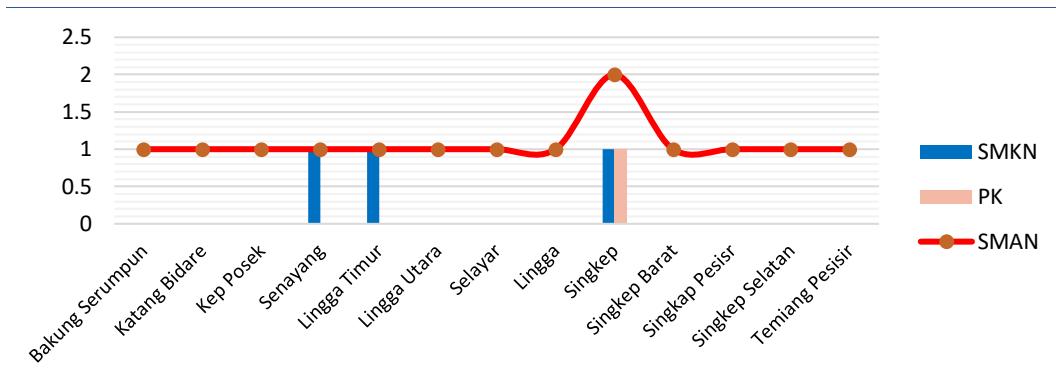


Sumber : Dapodik 2024

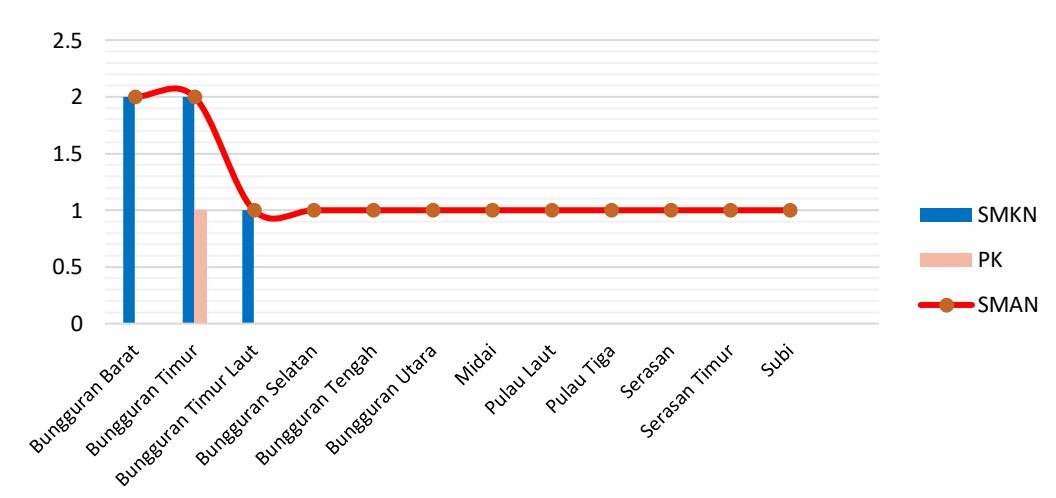
*Grafik 1.26
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri
Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Anambas Tahun 2024*



*Grafik 1.27
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri
Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Lingga Tahun 2024*



*Grafik 1.28
Sebaran Satuan Pendidikan Negeri
Berdasarkan Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Di Kabupaten Natuna Tahun 2024*



Sumber : Dapodik 2024

1.5.5. Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap usia sekolah adalah perbandingan jumlah sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk. Rasio ini menunjukkan kemampuan sekolah untuk menampung seluruh penduduk usia sekolah. Semakin tinggi nilai rasio, maka kesempatan belajar dan sekolah bagi penduduk usia sekolah akan semakin baik

Grafik 1.29
Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 - 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri 2024

Grafik 1.30
Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri 2024

1.5.6. Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Sekolah Menengah

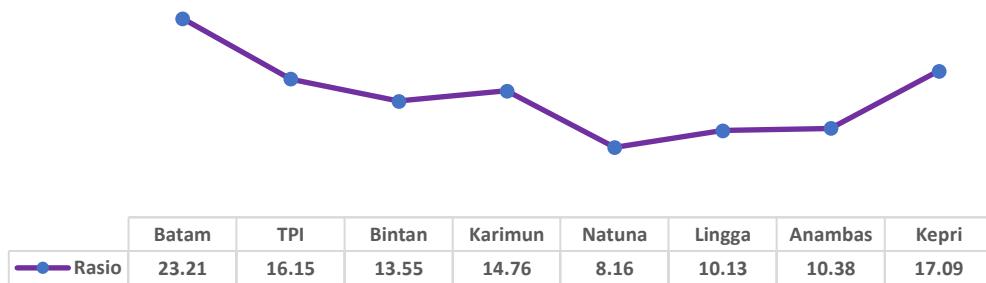
Rasio guru dan murid adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa dalam suatu lingkungan pembelajaran. Rasio ini penting karena memengaruhi kualitas pembelajaran, seperti interaksi guru dan siswa, pemberian perhatian individual, dan ketersediaan sumber daya pembelajaran.

Rasio guru dan murid dapat dihitung dengan membagi jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelas yang kecil dan rasio siswa-guru yang lebih rendah memberikan manfaat bagi

prestasi siswa. Namun, rasio guru dan murid bukan faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar. Keterampilan dan pengalaman pendidik juga perlu dipertimbangkan

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio antara murid dengan guru. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Rasio guru terhadap peserta didik pada pendidikan menengah yang ideal adalah 1:20 untuk pendidikan menengah atas dan 1:15 untuk pendidikan kejutuan.

Grafik 1.31
Rasio Pendidik Terhadap Peserta Didik Pendidikan Menengah Negeri
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

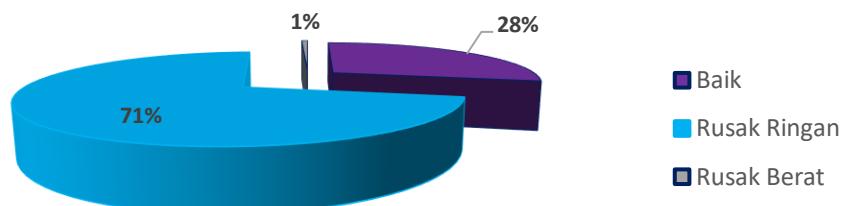


Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri 2024

1.5.7. sumber Daya Aset

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat sebagian aset yang dalam kondisi rusak berat, sehingga memerlukan perbaikan dalam pemeliharaannya sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya. Dari 16.455 Aset yang ada, sebanyak 5.009 aset dalam keadaan baik dan sisanya 12.427 rusak ringan dan 102 aset rusak berat. Berikut persentase asset yang baik, rusak ringan dan rusak berat.

*Grafik 1.32
Prosentase Kondisi Aset Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024*



Sumber : Lakip Dinas Pendidikan Prov Kepri Tahun 2023

1.6. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dapat diwujudkan melalui pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dijabarkan dalam kegiatan LAKIP dan Kinerja Indikator Utama, kedua alat ukur tersebut mencerminkan pencapaian secara umum hasil kinerja yang diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik diharapkan mampu mendorong terwujudnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berweibawa. Manfaat dari penyusunan Laporan kinerja agar instansi pemerintah mampu mendorong meyelenggarakan tugas dan fungsi secara baik dan benar (good governance), mendorong tumbuhnya pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Pencapaian nilai SAKIP dari tahun ke tahun menunjukkan nilai yang semakin meningkat, ini menggambarkan adanya peningkatan kinerja secafra keseluruhan mulai dari proses perencanaan hingga pencapaian target kinerja. Berikut pencapaian nilai SAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sbb :

Grafik 1.33
Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 - 2024

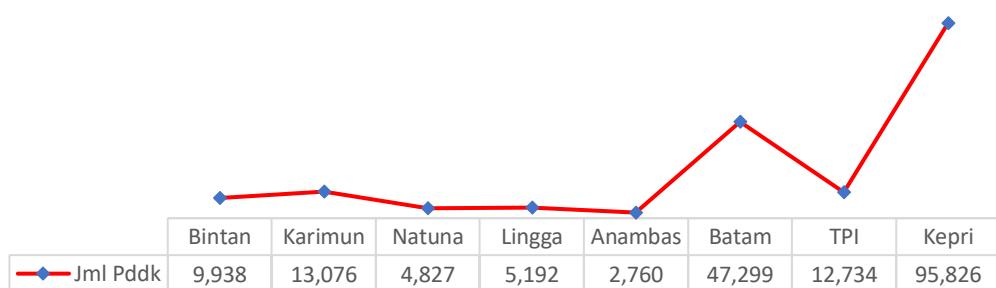


Sumber : Dinas Pendidikan Prov Kepri 2024

1.7. Kependudukan

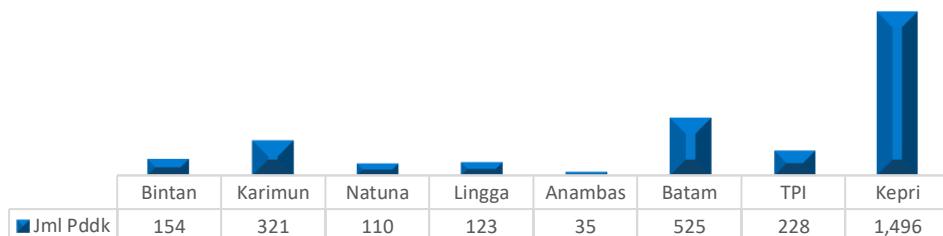
Penduduk pada usia tertentu (16-18 Tahun) merupakan sasaran dari indicator layanan Pendidikan khususnya layanan Pendidikan menengah (SMA/SMK) dan penduduk usia 4-18 yang memiliki layanan khusus merupakan sasaran layanan pendidikan khusus. Berikut jumlah penduduk tahun 2024.

Grafik 1.34
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur (16-18 Tahun)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Dinas PM dan Dukcapil Kepri 2024

Grafik 1.35
Jumlah Penduduk Disabilitas Berdasarkan Umur (4-18 Tahun)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Sumber : Dinas PM dan Dukcapil Kepri 2024

1.8. Isu Strategis

Beberapa isu strategis pendidikan dalam rangka pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 diantaranya terdapat Kesenjangan kualitas, sarana dan prasarana, distribusi tenaga pendidik dan kependidikan antar wilayah, kemampuan literasi dan numerasi masih rendah, transformasi pendidikan berbasis teknologi belum merata antar satuan pendidikan maupun antar wilayah, jumlah guru produktif yang terbatas serta belum maksimalnya penyelenggaran pendidikan vokasi berbasis potensi local.

Permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan diantaranya peningkatan kemampuan tenaga pendidik dengan pemerataan kemampuan ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga pendidik yang berbasis sertifikasi dan kompetensi, pemerataan distribusi tenaga pendidik dan guru produktif antar wilayah, pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi potensi pendidikan vokasi yang perlu terus didorong agar lulusan sekolah kejuruan menghasilkan SDM yang berdaya saing dan mampu terserap di dunia industri dan dunia usaha serta dapat bersaing di dalam ekosistem industri serta inventarisasi aset dan pola pengelolaan keuangan SMK yang berbasis PPK-BLUD

isu-isu strategis pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan menggunakan scoring dan diskusi dengan seluruh bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil diskusi dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Pendidikan dalam jangka waktu lima tahun kedepan meliputi:

1. Adanya kesenjangan layanan Pendidikan antar wilayah baik dari sisi mutu dan akses pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus, kondisi ini sangat dipengaruhi kondisi geografis wilayah dan pendanaan Pendidikan yang terbatas.
2. Belum seluruh fasilitas pendidikan dapat dipenuhi pada satuan Pendidikan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
3. Distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang belum merata, terutama pada daerah terluar dan perbatasan.
4. Masih rendahnya profesionalitas tenaga pendidik, hal ini dicerminkan masih rendahnya kepemilikan sertifikasi guru di satuan Pendidikan.
5. Kurangnya pemenuhan standar lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri (IDUKI) yang dipengaruhi oleh kurangnya peralatan penunjang praktek siswa dalam pemenuhan kebutuhan industri, belum optimalnya pembelajaran SMK yang berbasis kelas industri, belum optimalnya kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan industri, serta pola pengelolaan keuangan yang belum menerapkan PPKBLUD.
6. Masih kurangnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dipengaruhi oleh belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB.
7. Belum optimalnya peningkatan mutu Pendidikan SLB untuk menyiapkan penyandang disabilitas dapat diterima di lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta.
8. Kurangnya guru produktif (guru kompetensi) dan kurangnya kuantitas, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
9. Pengelolaan manajemen asset pada satuan Pendidikan (Tanah/Gedung) yang sebagian belum berkekuatan hukum (belum bersertifikat).
10. Terbatasnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran berbasis konten.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan sebagian outcome. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) kegiatan-kegiatan tahun 2024 diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi . Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan berbagai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah.
2. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya
3. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja sampai tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra.
4. Informasi/Analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan capaian kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada).
5. Informasi/Analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Informasi/Analisis upaya perbaikan kinerja ke depan
7. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
8. Informasi/analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas program.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Telaah Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”** Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai

sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan

yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk memperekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi, terutama pada Misi ke-3 yaitu "**Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa**".

Tujuan dari strategis misi ke-3 yaitu Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter. Dengan Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Mutu dan Akses Pendidikan, Tujuan dan sasaran strategis misi ke – 3 selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

- a. Tujuan: Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan
- b. Sasaran terdiri dari :
 1. Meningkatnya mutu Pendidikan
 2. Meningkatnya Akses Pendidikan
 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan

Untuk mendukung pencapaian tujuan pada Visi dan misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau didukung dengan program tahun 2021-2026 sbb :

1. Program Pengelola Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengendalian Perizinan
4. Program Pengembangan Murikulum
5. Program penuinjang urusan pemerintah daerah provinsi

Tujuan dan Sasaran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 beserta target kinerja di tuangkan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Urusan Bidang Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Akses Dan mutu Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,12	10,14	10,15	10,62	10,75	10,88
		Harapan Lama Sekolah	12,87	12,90	12,93	13,09	13,14	13,19
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,62	100	100	100	100	100

2.2. Rencana Kinerja

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari pelaksanaan rencana strategis lima tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana kerja organisasi merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta sumber pendanaan yang dijadikan dasar dari pelaksanaan kegiatan untuk mendukung dan mencapai tujuan organisasi. Rencana kerja organisasi perangkat daerah merupakan alat ukur untuk menilai pencapaian target kinerja perangkat daerah serta menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja organisasi. Berikut tujuan dan targeti kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Formula	Tahun Dasar	Target						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	AngkaPartisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	Jml pendudk usia 16-18 Thn yg masih bersekolah dan yg sdh tamat dibagi dengan jml penduduk usia 16-18 thn dikali 100%	84,62	86,42	100	100	100	100	100	100
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Jumlah lama sekolah penduduk usia 25 Thn ke atas dibagi jumlah penduduk usia 25 thn	10,12	10,12	10,14	10,15	10,62	10,75	10,88	10,88
		Harapan Sekolah	Tahun	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	12,87	12,88	12,90	12,93	13,09	13,14	13,19	13,19
2	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	%	Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimum B dibagi Jumlah SMA/SMK/SLB Negeri di kali 100	71,53	80	81	82	83	84	85	85
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	Jumlah SMK Negeri yang terevitalisasi dibagi jumlah SMK Negeri di kali 100	17,00	21,25	24,32	27,03	97,22	97,30	97,37	97,37
		Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	%	Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT/kedinasan di bagi dengan jumlah lulusan SMA di kali 100	na	na	na	na	33	34	35	35
		Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia	%	Jumlah lulusan SMK yg bekerja di IDUKA dibagi lulusan SMK Negeri	na	61	63	65	35	40	45	45

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Formula	Tahun Dasar	Target						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Periode
		Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)										
		Persentgase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	%	Jumlah PTK yg mengikuti diklat dinagi dengan jumlah PTK	na	na	na	na	12,58	12,60	12,63	12,63
4	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	Jumlah siswa SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 Thn	82,49	97,5	98	98,5	99	99,50	100	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	Jumlah siswa usis 16-18 thn di jenjang SMA/MA/SMK dibagi penduduk usia 16-18 thn di kali 100	77,20	97	78	79	80	81	82	82
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	Jumlah siswa di jenjang SLB dibagi jumlah penduduk usia 7-21 Thn dikali 100	83,00	83	84	85	87,00	88,00	90	90,00
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	Jumlah siswa SMA/MA/SMK/MAK dibagi jumlah ruang kelas	na	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Persentase Capaian IKU Dinas Pendidikan	%	Junlah Capaian kinerja di bagi jumlah target kinerja di kali 100	na	na	na	Na	91,5	92,5	93,5	93,5

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Prov Kepri 2024

2.3. Perjanjian Kinerja

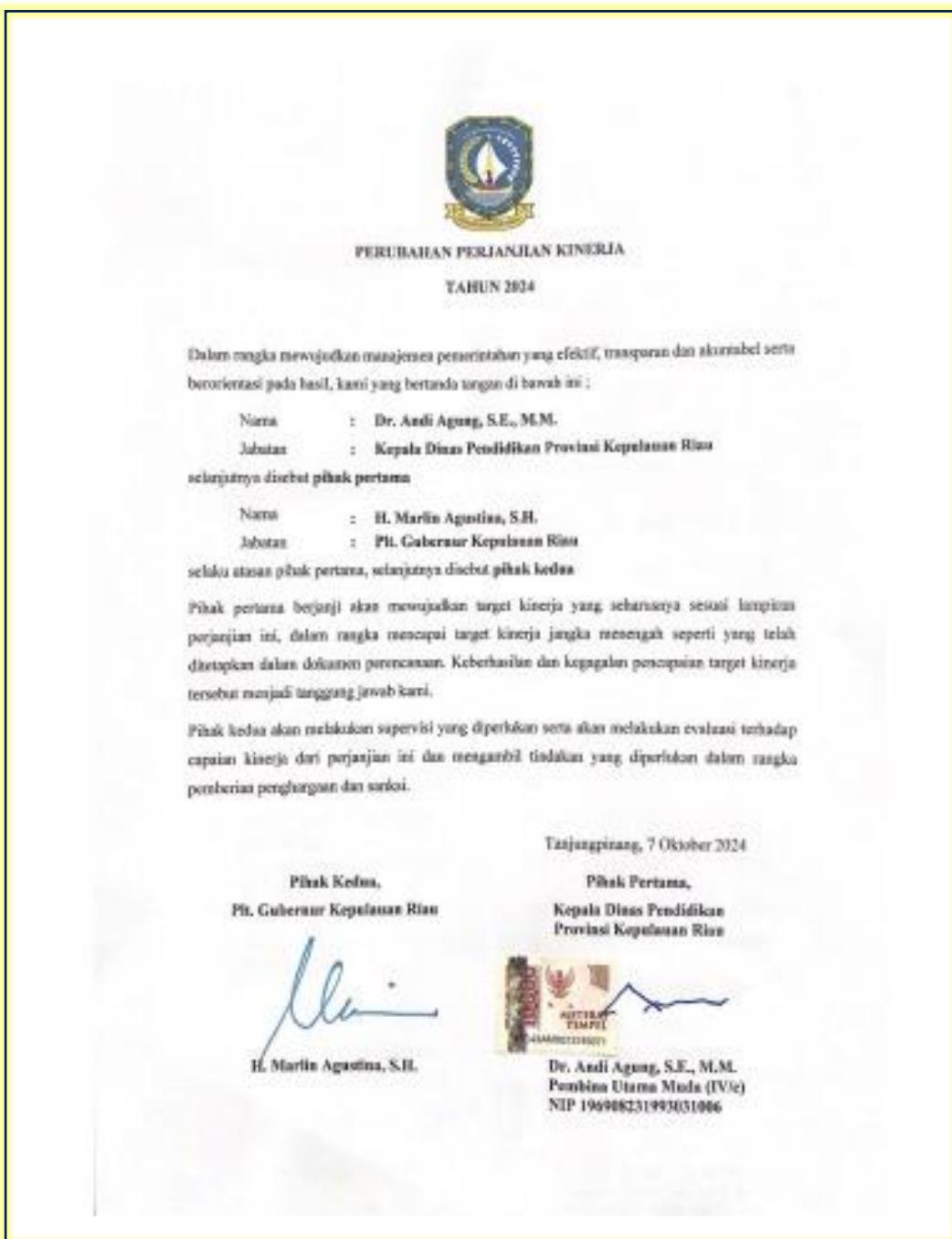
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan alat untuk mengukur kemampuan pimpinan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia dan keuangan dalam mencapai tujuan organisasi, perjanjian kinerja berisi target yang wajib dipenuhi dalam rangka perwujudan mensejahteraakan masyarakat.

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan telah menyusun Perjanjian Kinerja antara Kepaa Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau pada awal tahun anggaran 2024 yang terdiri dari 5 program yang pendanaan bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun anggaran 2024.

Kriteria keberhasilan Perjanjian Kinerja ini ditunjukkan dengan selisih positif capaian hasil indikator *outcome* terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Dalam perkembangannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 mengalami perubahan, perubahan ini terjadi karena adanya berbagai asumsi yang sudah direncanakan mengalami perubahan, perubahan yang terjadi sangat dipengaruhi regulasi yang juga ikut berubah, adanya perubahan pencapaian target mengalami penyesuaian dan berbagai persoalan lainnya yang mengharuskan RPJMD mengalami perubahan dalam rangka perbaikan capaian dan kemanfaatan bagi masyarakat

Rencana Strategis dapat mengalami perubahan yang disuaikan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, beberapa alasan perubahan renstra, di antaranya perubahan kebijakan, perubahan kondisi ekonomi, perubahan kebutuhan masyarakat, restrukturisasi organisasi, perubahan sumber daya dan hasil evaluasi kinerja yang menunjukkan perlunya penyesuaian strategi . Berikut perjanjian kinerja setelah perubahan renstra sbb



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		(3)	(4)	
1.	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimum B	83	
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,22	
		Tingkat Lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan	33	
		Tingkat Penyerapan Lulusan yang Bekerja di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)	35	
		Presentase PTK mengikuti Diklat untuk Peningkatan Kompetensi	12,58	
2.	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	80,00	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	87,00	
		Rasio Siswa Per Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK	1: 36	
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKU Dimas Pendidikan	91,5	

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 377.526.999.967,-	P APBD
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 379.760.000,-	P APBD
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 63.630.400,-	P APBD
4. Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 405.402.792,-	P APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 691.331.335.299,-	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
 Plt. Gubernur Kepulauan Riau

H/Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
 Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Kepulauan Riau



DR. Andi Agung, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda (IV/e)
 NIP 196908231993031006

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
I	1. Meningkatnya mutu pendidikan	1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	%	83
		2. Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	%	97,22
		3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	%	33
		4. Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	%	35
		5. Persentase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	%	12,58
	2. Meningkatnya Akses pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	99
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	%	80
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	87
		4. Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:36
	3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas kinerja pelayanan perangkat daerah	1. Persentase capaian IKU Dinas Pendidikan	%	91,5

Sejalan dengan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dengan demikian pagu anggaran juga mengikuti perubahan Renstra 2021-2026. Berikut pagu anggaran dan program yang endukung pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2024.

Tabel 2.4
Program dan Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Persentas Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Pendidikan	377,526,999,967	35,08
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	379,760,000	0,04
3	Pengendalian Perizinan Pendidikan	63.630.400	0,01
4	Pengembangan Kurikulum	405,402,792	0,04
5	Penunjang Penunjang Urusan Pemerindah Daerah	695,616,579	64,84
	Jumlah	1,076,236,158,457	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat nilai capaian kinerja

Percentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dalam Melakukan evaluasi kinerja terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian tersebut maka digunakan skala pengukuran yang terdiri dari empat kategori, yakni kategori **“sangat baik”** apabila capaian kinerjanya lebih dari $75 \geq 100\%$, kategori **“baik”** apabila capaian kinerjanya $55\% \geq 75\%$, kategori **“cukup”** apabila capaian kinerjanya $\geq 55\%$, kategori **“kurang”**. Berikut skala penilaian peringkat kinerja dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
4	$\geq 100\%$	Sangat Baik
3	$75\% \geq 100\%$	Baik
2	$55\% \geq 75\%$	Cukup
1	$< 55\%$	kurang

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Penilaian capaian kinerja merupakan evaluasi bertujuan untuk diketahui pencapaian realisasi dari target kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis permasalahan dan alternative solusi dari berbagai capaian kinerja yang belum terealisasi.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah capaiannya:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realiasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain:

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
4. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di

- bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran yang terdiri 3 sasaran dan sebanyak Indikator serta membandingkan dengan capaian tahun lalu, capaian renstra dan target secara nasional.

Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 11 indikator kinerja.

Tabel 3.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	10,12	10,14	10,15	10,62	10,75	10,88
		Harapan Lama Sekolah	12,87	12,90	12,93	13,09	13,14	13,19
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	84,62	100	100	100	100	100

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	83	81,25	97,89	Baik
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,22	97,36	100,14	Sangat Baik
		Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	33	35,59	107,85	Baik
		Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	35	39,86	113,89	Sangat Baik
		Persentase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	12,58	14.20	116,14	Sangat Baik
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99	108,45	109,55	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	80	87,94	109,93	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	87,00	117,98	135,61	Sangat Baik
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	1:23,5	153,19	Sangat Baik
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Persentase capaian IKU Dinas Pendidikan	91,5	9	116.02	Sangat Baik

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 3.4 disimpulkan bahwa capaian kinerja indicator utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang melampaui target sebanyak 9 indikator. Indikator dimaksud terdiri atas Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi dengan capaian kinerja 100,1%, Tingkat penyerapan lulusan SMK di dunia usaha dan Dunia industry (IDUKA) dengan capaian kinerja 116,14%, Angka partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK dengan capaian kinerja 109,93%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK dengan capaian kinerja 109,27%, Angka Partisipasi Kasar SLB dengan capaian kinerja 135,61% dan Rasio siswa perkelas SMA/MA/SMK/MAK dengan capaian kinerja 153,19%.

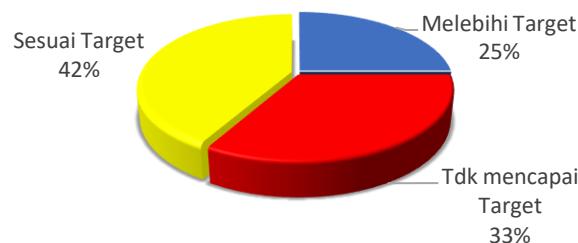
Beberapa indicator kinerja utama yang masih perlu ditingkatkan Tingkat Lulusan SMA yang melanjutkan ke PTN dengan capaian kinerja

92,88%, sma/smk/slb dengan akreditasi minimal B capaian kinerja 97,89%. Berdasarkan pengukuran kinerja yang merujuk pada Tabel 3.5 dapat diperoleh informasi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah	Capaian
1	Melebihi/Melampaui Target	8	114,27
2	Sesuai Target	0	0
3	Tidak Mencapai Target	1	97,89

Grafik 3.1
Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



3.1.3. Pengukuran dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

3.1.3.1. Capaian Kinerja Indikator Kepala Daerah

Indikator kinerja kinerja Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 beserta target kinerja meliputi :

1. Rata- Rata Lama Sekolah (RLS)
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berikut capaian kinerja kepala daerah, berdasarkan tujuan sasaran

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada Rencana pembangunan Jangka Panjang 2021-2026 sbb :

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut proses pendidikan sudah selesai. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk di wilayah tersebut. RLS merupakan salah satu unsur dalam menghitung Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

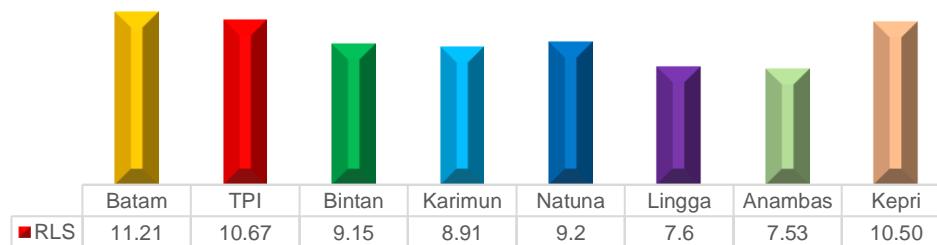
Capaian kinerja Rata-Rata Lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun **2024** ditargetkan pada angka **10,62** dan realisasi kinerja pada tahun 2024 tercatat pada angka **10,50** atau setara dengan **98,87%**. Berikut capaian RLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 sbb :

Grafik 3.2
Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024



Sumber : BPS RI 2024

Grafik 3.3.
Realisasi Kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RLS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



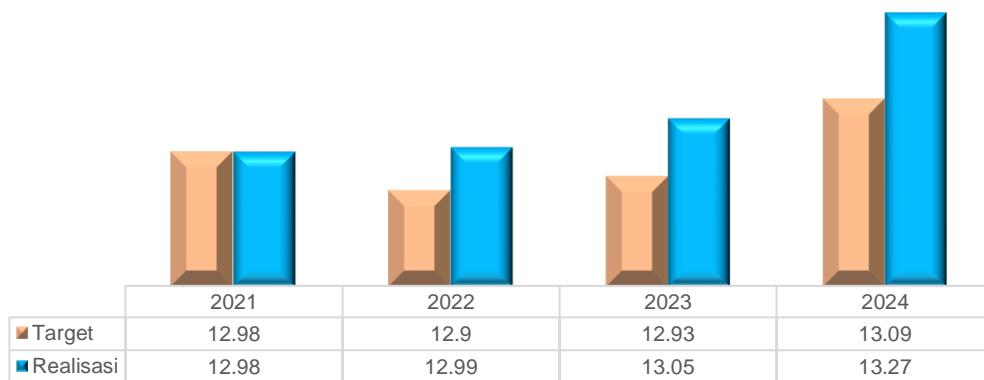
2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diukur dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan.

Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

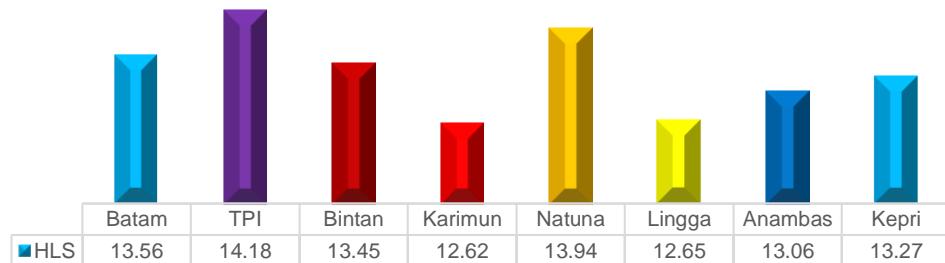
Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, Pada tahun **2024** ditargetkan HLS di Provinsi Riau pada angka **13,09** dengan capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai **13,27** atau setara dengan **101,4%**. Berikut capaian HLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 sbb :

Grafik 3.4
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024



Sumber : BPS RI 2024

Grafik 3.5
Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



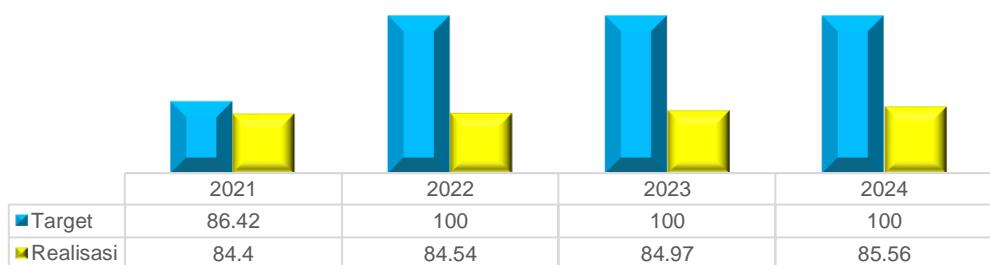
Sumber : BPS RI 2024

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah

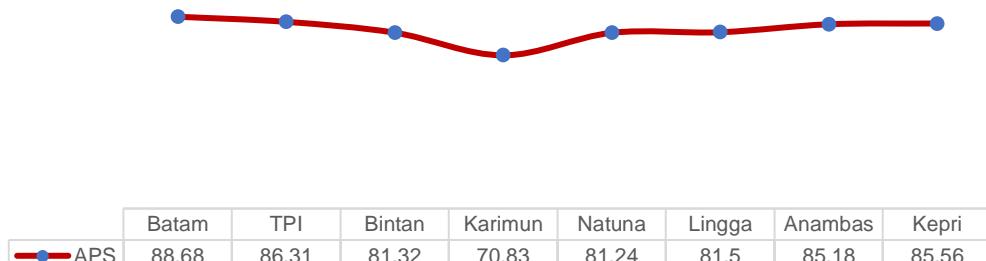
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 ditargetkan sebesar **100%**, dimana realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan berada pada angka **85,56%** atau setara dengan capaian kinerja pada tahun 2024 mencapai 85,56%. Berikut capaian HLS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024 sbb

Grafik 3.6
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024



Sumber : BPS RI 2024

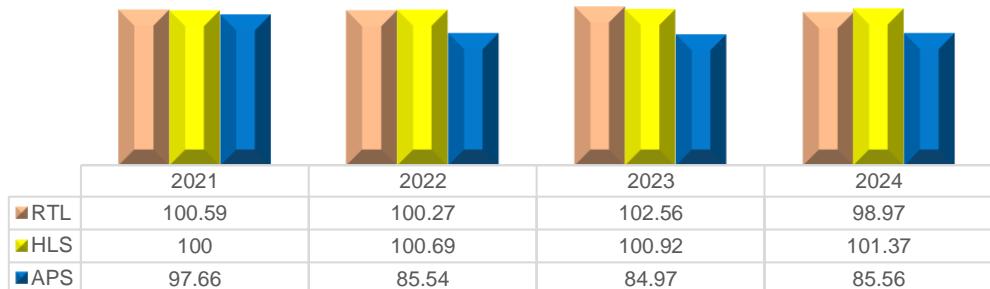
Grafik 3.7
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Di Kab/kota Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : BPS RI 2024

Grafik 3.8 di bawah ini menjelaskan capaian kinerja Rata Rata Lama Sekolah (RTL), Harapan lama Sekolah (HLS) dan Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sd 2024.

Grafik 3.8
Capaian Kinerja (%) RLS, HLS dan APS
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS RI 2024

3.1.3.2. Capaian Kinerja Indikator Utama Perangkat Daerah

3.1.3.2.1. Meningkatnya Mutu Pendidikan

Capaian indicator sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan terdiri atas 5 indikator sasaran, indicator sasaran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sbb :

1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terkreditasi Minimal B
2. SMK negeri yang terevitalisasi

3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan
4. Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)
5. Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) mengikuti Diklat.

Berikut pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Mutu Pendidikan pada tahun 2024 beserta eviden pendukung dan penjelasannya sbb :

1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (assesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Di samping itu yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Akreditasi sekolah yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada dan 8 Standar lainnya yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan. Akreditasi bukan hanya sekadar pemberian label atau sertifikat, tetapi juga merupakan suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap Lembaga Pendidikan, Akreditasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga tersebut, serta memberikan panduan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Berikut capaian kinerja SMAN/SMKN/SLBN terakreditasi minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Kinerja SMA/MA/SMK Negeri Yang Terakreditasi Minimal B
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	83	81,25	97,89	Baik

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja yang ditampilkan pada Tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada indicator sasaran **SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B** pencapaian kinerja pada tahun 2024 terealisasi **81,25%** dari target **83%** atau setara dengan pencapaian kinerja **97,89%** dengan peringkat kinerja **Baik**



Perkembangan capaian kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B di Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif, kondisi salah satu penyebabnya adalah masa waktu akreditasi sekolah yang sudah kadaluarsa serta terdapat penambahan sekolah baru pada beberapa tahun terakhir yang secara regulasi penilaian akreditasi belum dapat dilakukan karena sekolah yang akan dilakukan penilaian akreditasi belum memenuhi syarat secara regulasi.

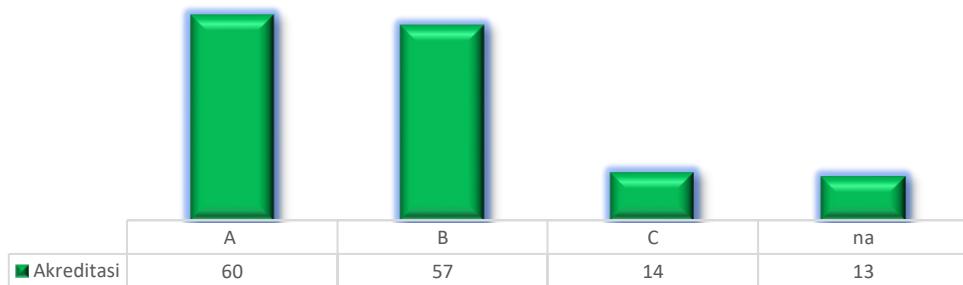
Grafik 3.10 Berikut menjelaskan Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2024

Grafik 3.10
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2024



Pada Tabel 3.11 dibawah ini menjelaskan bahwa dari, sebanyak 117 Satuan pendidikan telah terkreditas A dan B atau setara dengan 81,25%, sedangkan akreditasi C dan Non Akreditasi sebanyak 27 Satuan pendidikan atau setara dengan 18,75%. Selanjutnya Tabel 3.11 menjelaskan capaian kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2024, dimana capaian kinerja pada tahun 2024 tercatat pada 97,89 dan realisasi capaian kinerja pada akhir renstra 95,58%

Grafik 3.11
Sebaran Akreditasi Sekolah Menengah, kejuruan dan Pendidikan Khusus
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2024



Tabel 3.7
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi Sekolah Negeri Minimal B
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	82	81,29	99,13	82	74,1	90,36	83	81,25	97,89	85	81,25	95,58	-	-	-

Keberhasilan pencapaian kinerja SMAN/SMKN/SLBN yang terkreditasi minimal B disebabkan beberapa faktor sbb :

- a. Melengkapi secara bertahap fasilitas, sarana dan prasarana satuan Pendidikan.
- b. Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program Teaching factory, program link and macth, pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik
- c. Peningkatan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai pelatihan kompetensi, peningkatan jumlah guru yang bersertifikasi, peningkatan berbagai aktivitas peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakuler, menjalin kemitraan satuan Pendidikan dengan dunia industry dalam rangka peningkatan ketrampilan peserta didik melalui praktik kerja industry, pembinaan bagi peserta didik berprestasi di berbagai ajang lomba, manajemen pengelolaan keuangan berbasis akrual, sistem perencanaan satuan Pendidikan yang terukur, pengembangan dan pengayaan kurikulum Pendidikan berbasis teknologi infomasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta peningkatan 8 kriteria penilaian akreditasi serta melakukan evaluasi secara berkala dan komprehensif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, adaptif terhadap perubahan, respon cepat terhadap permasalahan dan percepatan terhadap peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan.

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya kinerja SMAN/SMKN/SLBN yang terkreditasi minimal B disebabkan beberapa faktor sbb :

- a. Pada tahun 2024 terdapat 2 penambahan satuan pendidikan menengah kejuruan dan menengah atas, secaa regulasi 2 satuan Pendidikan dimaksud belum dapat dilakukan penilaian akreditasi karena belum memenuhi 8 kriteria penilaian terutama pada kriteria standar sarana prasarana, standar kompetensi, standar proses dan standar pengelolaan.
- b. Pada beberapa satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus

- masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta kekurangan beberapa standar penilaian lain belum dapat dipenuhi sebagai persyaratan untuk proses akreditasi.
- c. Pada beberapa satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang telah terkreditasi masa berlakunya sudah kadaluarsa dan saat ini masih proses akreditasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran sesuai target serta berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka rencana tindak lanjut dan perbaikan kinerja yang akan datang perlu dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan capaian kinerja akreditasi sekolah sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses akreditasi bagi satuan Pendidikan yang masa akreditasinya yang sudah berakhir dan satuan pendidikan yang masih berkreditasi C melalui pendampingan dan penguatan anggaran dalam proses pengusulan, penilaian dan kelengkapan administrasi nilai akhir akreditasi.
- b. Secara bertahap melengkapi berbagai kebutuhan satuan Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Melakukan pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap kualitas sumber daya manusia, penunjang kurikulum dan jenjang karir tenaga pendidik dan kependidikan.
- d. Peningkatan kualitas pendidik melalui berbagai instrument pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industry.
- e. Meningkatkan Pendidikan inklusi secara merata pada satuan Pendidikan dan merata pada setiap wilayah.
- f. Menyesuaikan dan memperbaiki kualitas peserta didik dengan berbagai instumen seperti pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran, praktik kerja peserta didik sesuai dengan bidangnya, pengembangan kurikulum yang berorientasi pasar dan perkembangan zaman

- g. Menjadikan satuan Pendidikan sebagai basis utama untuk menanamkan nilai-nilai keberadaban dalam sikap, tingkah laku, etika, moral dan budi pekerti dalam bermasyarakat.

Penghematan anggaran untuk mencapai target kinerja menjadi salah satu alat ukur bagi organisasi untuk melalukan efisiensi, efisiensi berkaitan erat dengan efektivitas capaian kinerja. Efektivitas pencapaian anggaran akan sangat ditentukan dengan cara yang tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan anggaran yang minimal digunakan agar capaian kinerja dapat dicapai. Berikut capaian kinerja yang berkaitan antara capaian kinerja efisiensi dengan efektivitas capaian kinerja SMAVSMK/SLB terkreditasi minimal B sbb :

Tabel 3.8
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi minimal B	%	83	81,25	97,89	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidik dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023 377.526.999.967 405.402.792 379.760.000 63.630.400	686.397.864.004 360.106.222.538 331.001.647 321.180.012 61.758.400	98,67 95,39 81,65 84,57 97,06
	Capaian Kinerja			97,89		Capaian Kinerja Keuangan			97,48
								Tingkat Efisiensi	0,41
								Tingkat Efektivitas	100,42

Pada Tabel 3.8 menjelaskan hubungan antara tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja SMA/SMK/SLNB yang terkreditasi Minimal B menunjukkan nilai yang baik, realisasi kinerja tercatat pada angka 97,89% dan realisasi anggaran 97,51% dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,41% dengan pencapaian tingkat efektivitas capaian program 100,42%

2. SMK Negeri Terevitalisasi

Revitalisasi SMK adalah upaya terencana, terukur, dan terorganisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan sumber daya manusia

Indonesia melalui pendidikan kejuruan. Revitalisasi SMK dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. SMK merupakan salah satu institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk terjun langsung di dunia kerja setelah lulus

Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI) yang terus menerus berkembang. Program Revitalisasi yang dilaksanakan oleh SMK meliputi pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan DUDI, inovasi pembelajaran yang mendorong keterampilan, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, standarisasi sarana dan prasarana utama, pemutakhiran program kerja sama industry, pengelolaan dan penataan lembaga, serta peningkatan akses sertifikasi kompetensi. Serta perbaikan dan penyelarasan kurikulum SMK akan memantapkan model kesesuaian dan keterkaitan (link and match) dengan DUDI.

Tabel 3.9
Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jml SMKN	Terevitalisasi		%
			Y	T	
1.	Bintan	4	4	0	100
2.	Karimun	5	5	0	100
3.	Batam	11	10	1	90,9
4.	Tanjungpinang	5	5	0	100
5.	Natuna	5	5	0	100
6.	Lingga	4	4	0	100
7.	Anambas	4	4	0	100
	Kepri	38	37	1	97,36

Berdasarkan Tabel 3.10 dibawah ini, menjelaskan bahwa capaian kinerja SMKN yang terevitalisasi pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi **97,36%** diatas target kinerja **97,22 %** dengan tingkat capaian kinerja **100,14%** dengan predikat kinerja **Sangat baik**.

Tabel 3.10
Analisa Capaian Kinerja
SMKN yang Terevitalisasi Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu Pendidikan	SMKN terevitalisasi yg	97,22	97,36	100,14	Sangat Baik

Grafik 3.12
Penyebaran SMK Negeri Terevitalisasi Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2024



Tabel 3.11
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Akreditasi SMK Negeri Terevitalisasi
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir Renstra			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
SMKN yang terevitalisasi	24,32	97,22	379,1	27,03	97,22	359,6	97,22	97,36	100,14	97,37	97,36	99,98	-	-	-

Keberhasilan/kegagalan pencapaian Indikator sasaran Persentase SMKN yang terevitalisasi disebabkan beberapa faktor sbb :

- a. Tersedianya peluang pasar kerja yang semakin tumbuh di Provinsi Kepulauan Riau, seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19. Hal ini didukung semakin meningkatnya investasi dan nilai ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, adaptif terhadap perubahan, respon cepat terhadap permasalahan dan percepatan terhadap peningkatan sumber daya pendidik dan kependidikan.
- c. Pada tahun 2024 terdapat penambahan satuan pendidikan menengah kejuruan baru, penambahan satuan pendidik baru tersebut belum dapat dilakukan revitalisasi karena belum memenuhi persyaratan.
- d. Melakukan berbagai upaya optimalkan fasilitas yang dimiliki sekolah, Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka memperbarui fasilitas Pendidikan, Menyelaraskan dan memutakhirkan kurikulum, Meningkatkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, Membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DU/DI) dan perguruan tinggi, melakukan standarisasi sarana dan prasarana utama, Menata dan mengelola kelembagaan satuan Pendidikan, Link and match dengan industri., Pengembangan dan adaptasi kurikulum berbasis industri., Program Teaching factory, Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan Uji Sertifikasi Profesi pendidik serta secara bertahap pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah dan meningkatkan SMKN yang terevitalisasi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan terus meningkatkan standarisasi kelulusan, sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, memperkuat

- penggunaan teknologi informasi sebagai bahan pembelajaran, Kerjasama yang lebih luas dan saling menguntungkan dengan DUDI, perluasan program link and macth dan responsive terhadap perubahan kebutuhan pasar
- Secara bertahap melengkapi kebutuhan satuan Pendidikan kejuruan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - Memperkuat program teknologi informasi serta penguatan peran dan fungsi Lembaga/Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Lembaga yang mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Tabel berikut merupakan Analisis Perbandingan Capaian Kinerja SMK yang terevitalisasi Tahun 2024 serta Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMK yang terveitalisasi di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024

Tabel 3.12
Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja SMK Terevitalisasi
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	SMKN yang terevitalisasi	%	97,22	97,36	100,14	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan SMK 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidik dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023 143.731.404.700 405.402.792 379.760.000 63.630.400	686.397.864.004 135.578.222.050 331.001.647 321.180.012 61.758.400	98,67 94,33 81,65 84,57 97,06
Caoaian Kinerja			100,14		Capaian Kinerja Keuangan			91,26	
									Tingkat Efisiensi 8,88
									Tingkat Efektivitas 109,73

Pada Tabel 3.12 menjelaskan hubungan antara tingkat efisiensi sumber daya dan tingkat efektivitas program capaian kinerja SMKN yang terevitalisasi menunjukkan nilai korelasi kinerja **sangat baik**, dengan persentase realisasi kinerja tercatat pada angka 100,14% dan persentase realisasi keuangan 91.26% dengan demikian terdapat efisiensi sumber

daya 8.88% dengan pencapaian tingkat efektivitas program sebesar 109.73%

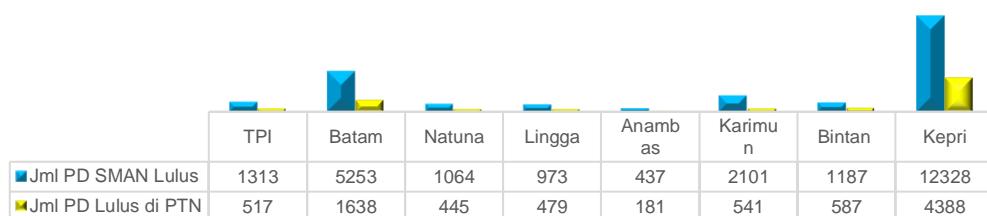
3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan

Semakin tinggi lulusan peserta didik dari sekolah menengah atas yang melanjutkan Pendidikan pada perguruan tinggi negeri/sekolah kedinasan, mengindikasikan bahwa mutu Pendidikan di suatu wilayah semain baik. Ada beberapa jalur yang dapat digunakan untuk lulus di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), calon mahasiswa bisa mengikuti salah satu jalur seleksi berikut:

- a. SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi): Jalur ini berbasis prestasi akademik dan non-akademik. Siswa akan diseleksi berdasarkan nilai rapor, prestasi, dan portofolio tanpa harus mengikuti tes tertulis.
- b. SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) jalur ini Seleksi Nasional Berbasis Tes adalah jalur masuk perguruan tinggi yang menggunakan tes tertulis sebagai penentu kelulusan.
- c. Jalur Mandiri, Setiap PTN memiliki jalur mandiri yang bisa dibuka setelah SNBP atau SNBT. Sistem seleksi beragam, termasuk melalui jalur prestasi dan tes ujian masuk PTN.

Lulusan Sekolah Menengah Atas memiliki beberapa pilihan setelah lulus, alumni SMA dapat bekerja pada DUDI, melanjutkan pendidikan, mendirikan usaha/berusaha. Lulusan SMA dapat melanjutkan ke Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik maupun sekolah kedinasan.

Grafik 3.13
Jumlah Lulusan Peserta Didik SMAN
dan Lulusan Peserta Didik Lulus di PT/Sekolah Kedinasan
Tahun 2024



Tabel 3.13
Analisa Pencapaian Kinerja
Lulusan SMA Yang Melanjutkan Ke Pendidikan Tinggi/Kedinasan
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	Lulusan SMA yg melanjutkan Pendidikan tinggi/kedinasan	33	35,59	107,85	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.13 menjelaskan bahwa capaian kinerja lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan pada tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau terealisasi 35,598% atau setara 107,85% dari realisasi kinerja dengan predikat kinerja **Sangat Baik**.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian Indikator Lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/Kedinasan disebabkan beberapa faktor sbb :

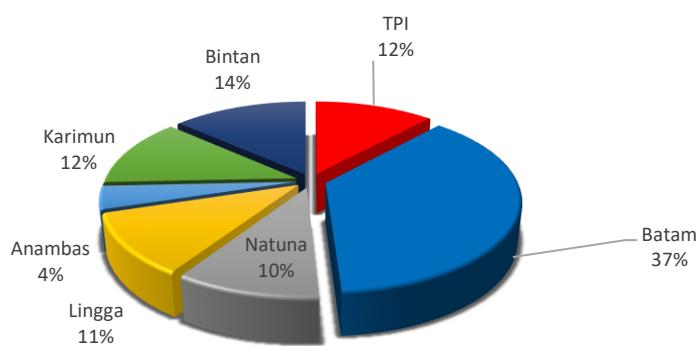
- a. Pemerataan fasilitas pendidikan yang semakin membaik antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- b. Membaiknya kualitas pendidik dengan semakin meningkatnya pendidik melalui peningkatan kemampuan melalui skema peningkatan pendidikan tenaga pendidik dan peningkatan persentase pendidik yang memiliki sertifikasi.
- c. Membaiknya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
- d. Meningkatnya Pengayaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang belum maksimal, hal ini belum di dukung dengan ketersedian fasilitas teknologi informasi yang merata di semua wilayah.
- e. Ketersedian dan pilihan perguruan tinggi yang di dukung program dan jurusan yang semakin berkembang sehingga meningkatkan minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
- f. Membaiknya faktor ekonomi keluarga sehingga tekanan terhadap pengeluaran biaya pendidikan semakin membaik.

- g. Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kab/kota yang ada dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui berbagai skema.

Tabel 3.14
Jumlah Lulusan Siswa SMAN Pada PTN
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa Lulus SMA	Jumlah Siswa Lulus di PTN Dalam Provinsi	Jumlah Siswa Lulus di PTN (%)
1.	Tanjungpinang	1313	517	39,98
2.	Batam	5253	1638	31,18
3.	Natuna	1064	445	41,28
4.	Lingga	973	479	49,23
5.	Anambas	437	181	41,42
6.	Karimun	2101	541	25,75
7.	Bintan	1187	587	49,45
	Kepri	12328	4388	35,59

Grafik 3.14
Persentase Lulusan Siswa SMAN Pada PTN
Tahun 2024



Pada Tabel 3.14 terdapat beberapa daerah yang pencapaian lulusan SMA yg melanjutkan ke PTN masih dibawah 33% sesuai target yaitu Batam dan Karimun, Untuk meningkatkan target lulusan SMA yang melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi, terutama pada daerah yang cakupan masih rendah beberapa kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau

sbb :

- a. Meningkatkan akreditasi sekolah melalui strategi penguatan manajemen sekolah meliputi kegiatan peningkatan kemampuan mengajar dan pengetahuan pendidik melalui program sertifikasi guru, peningkatan Pendidikan dan pelatihan, penguatan 8 standar dokumen akreditasi sekolah, manajemen proses belajar mengajar dan penguatan kurikulum.
- b. Menyediakan bantuan Pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu melalui skema beasiswa dan bantuan hidup mahasiswa selama mengikuti Pendidikan.
- c. Meningkatkan program bimbingan belajar dan tryout secara rutin, program ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan siswa melalui pengayaan berbagai soal dan strategi menjawab berbagai pertanyaan dengan tepat serta adanya manajemen waktu dalam penyelesaian berbagai pertanyaan.
- d. Meningkatkan motivasi siswa melalui berbagai pendekatan baik dari pendekatan agama, emosi, bakat dan berbagai cerita keberhasilan dan pengalaman senior atau siswa laian dalam menempuh ujian masuk PTN.
- e. Mendorong perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan reputasi dan akreditasi program studi, program studi yang ditawarkan menarik dan sesuai dengan kebutuhan zaman, peningkatan fasilitas kampus, biaya Pendidikan tinggi yang lebih fleksibel dan sistem perkualihan yang lebih efektif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk kemudahan perkualihan.
- f. Memperbanyak pilihan perguruan tinggi maupun program studi yang disesuaikan kebutuhan pasar.
- g. Membangun kemitraan dan komunikasi yang lebih aktif dengan alumni perguruan tinggi yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator kepada juniornya untuk melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi.
- h. Satuan pendidikan menyiapkan peserta didik dengan berbagai strategi dan pengetahuan tambahan serta mengenali bakat,

kemampuan dan minat peserta didik untuk diarahkan pada pilihan melanjutkan ke Pendidikan tinggi yang tepat.

- i. Dalam rangka peningkatakan kesejahteraan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyediakan berbagai kebijakan penguatan pendapatan masyarakat dengan berbagai berbagai kebijakan penguatan ekonomi yang bersifat pengembangan usaha dan penguatan modal bagi masyarakat seperti bantuan pinjaman modal tanpa bunga dan subsidi bunga pinjaman, bantuan peralatan berusaha seperti peralatan pertanian, perikanan, peningkatan ketrampilan petani dan nelayan melalui berbagai pelatihan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi pengolahan hasil produksi, pengembangan produk, kualitas produk , pengenalan produk secara online dan perlindungan harga produk melalui operasi pasar dan perlindungan produk

Tabel 3.15
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMAN yg Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi/Sekolah Kedinasan
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 - 2024

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir Renstra			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Lulusan SMA yg Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi/Sekolah Kedinasan	na	na	na	na	na	na	33	35,59	107,84	35	35,59	102,4	-	-	-

Lulusan peserta didik Sekolah Menengah Atas pada perguruan tinggi negeri/sekolah kedinasan, merupakan indikator kinerja baru yang ditargetkan pada Perubahan Rencana Strategis (P-Resntra) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-206. Indikator ini merupakan gambaran mutu pendidikan di suatu wilayah terutama untuk mengetahui kualitas pendidikan yang berasal dari pendidikan menengah atas,

Indikator ini menggambarkan, jika lulusan peserta didik sekolah menengah atas semakin tinggi diterima atau berkuliah di perguruan tinggi maka penilaian dapat diartikan bahwa kualitas pendidikan menengah di suatu wilayah akan semakin baik. Keadaan ini juga menggambarkan bahwa fasilitas pendidikan di wilayah tersebut juga lebih baik dan didukung dengan ketersedian dapendidik yang cukup disertai dengan kualitas pendidik yang jauh lebih tinggi'

Tabel 3.16
Analisa Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja
Lulusan SMA Yang Melanjutkan ke PTN
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Lulusan SMAN yg melanjutkan Ke Pendidikan tinggi/kedinasan	%	33	35,59	107,48	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan SMA 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidikan dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023 219.216.229.867 405.402.792 379.760.000 63.630.400	686.397.864.004 212.074.643.276 331.001.647 321.180.012 61.758.400	98.67 96.74 81,65 84,57 97,06
	Capaian Kinerja			107,84		Capaian Kinerja Keuangan			91.74
									Tingkat Efisiensi
									16.11
									Tingkat Efektivitas
									117.56

Pada Tabel 3.16 menjelaskan Analisa antara tingkat efektivitas dan efisiensi capaian kinerja Lulusan SMA yg melanjutkan ke PTN, persentase realisasi kinerja tercatat pada angka 35,59 dari target 33% dengan persentase capaian kinerja 107,48% dan realisasi kinerja keuangan 91.73% Dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 16.11% dan pencapaian tingkata efektivitas capaian program 117.56%

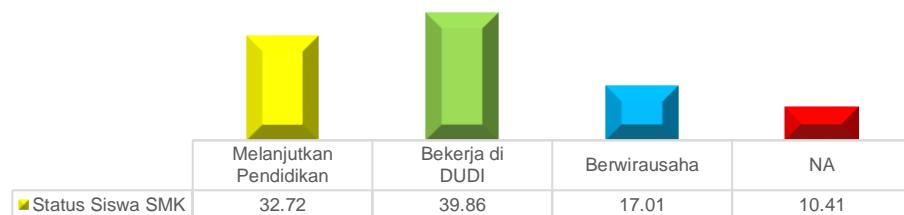
4. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yg Bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)

Transformasi pendidikan vokasi melalui program SMK Pusat Keunggulan berhasil melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Transformasi itu juga berhasil meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap lulusan pendidikan vokasi. Peningkatan kepercayaan DUDI terhadap pendidikan vokasi setidaknya dibuktikan dari antusiasme DUDI terhadap lulusan SMK

Lulusan Sekolah Menengah Atas memiliki beberapa pilihan setelah lulus, alumni SMK dapat bekerja pada DUDI, melanjutkan pendidikan, mendirikan usaha/berusaha. Lulusan SMK memiliki keunggulan dalam

bidang tertentu karena telah menerima pelatihan keterampilan teknis yang lebih spesifik selama masa sekolah. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki pilihan untuk bekerja, berwirausaha, ataupun meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Grafik 3.15
Percentase Status Siswa SMK Setelah Lulus Sekolah
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



Sumber : Rapor Pendidikan 2024

Berdasarkan Grafik 3.15 menjelaskan bahwa tidak semua Lulusan SMK yang bekerja di DUDI, sebanyak 32,72% lulusan SMK melanjutkan pada Pendidikan yang lebih tinggi, sebanyak 17,01% lulusan SMK berwirausaha dengan berbagai kerja yang sesuai dengan kemampuan yg di dapat pada Pendidikan dan sisanya sekitar 10,41% lulusan SMK tidak/belum diketahui aktivitas setelah lulus.

Pada tahun 2024 sebanyak 39,86% lulusan SMK terserap pada dunia industry dan dunia usaha (IDUKA), capaian kinerja ini diatas target pada tahun 2024 yaitu 35%, capaian kinerja ini setara dengan **113,88** diatas target dengan predikat kinerja **sangat baik**.

Tabel 3.17
Analisa Pencapaian Kinerja
Penyerapan Lulusan SMK yang Bekerja di IDUKA
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA	35	39,86	113,88	Sangat Baik

Sumber : Rapor Pendidikan 2024

Keberhasilan/kegagalan pencapaian Indikator sasaran 4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK yang bekerja di IDUKA disebabkan beberapa faktor sbb :

- a. Tingginya serapan lulusan SMK pada Dudi disebakan lulusan SMK memiliki standar yang tinggi dan setiap lulusan SMK memiliki kemampuan yang dibutuhkan pasar kerja.
- b. Berbagai jurusan yang ditawarkan SMK disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan insdutri dan didukung penguasaan teknologi.
- c. Satuan Pendidikan SMK membangun kemitraan dan kepercayaan terutama dunia industry/usaha, melalui berbagai program pemangangan peserta didik pada berbagai industry/perusahaan yang standar keahlian disesuaikan dengan kebutuhan industry dimaksud, sehingga jika selesai pemagangan dan dinyatakan lulus sesuai dengan standar keahlian perusahaan maka perusahaan/industry dapat langsung merekrut lulusan SMK dimaksud.
- d. Memperkuat Program Link and Match, program ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, usaha, dan industry. Program ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja handal yang memiliki keterampilan sesuai dengan job desk, program ini meliputi berbagai kegiatan, seperti penyelarasan kurikulum, pelatihan guru, prakerin, penyediaan pelatih tempat kerja, dan evaluasi program. Program Link and Match dapat membantu SMK untuk menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DUDI). Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan program ini, di antaranya: Competency based training (CBT), Program MoU dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Praktek kerja industri (PRAKERIN), Uji kompetensi keahlian (UKK), pemagangan guru produktif, program Upskilling dan Reskilling Guru SMK dan program factory teaching.
- e. Kesenjangan fasilitas Pendidikan terutama di wilayah terpencil, ketersedian dan penyebaran guru produktif yang belum merata, kesesuai kurikulum pembelajaran dan terbatasnya DUDI untuk

praktek kerja (Prakerin) terutama pada wilayah di kabupaten yang terbatas industrinya menyebabkan sebagian kualitas lulusan SMK masih kesulitan diterima di DUDI.

- f. Perkuat kompetensi teknologi informasi dan komunikasi, Strategi ini menekankan kemampuan dasar penguasaan teknologi dalam mendukung kualitas lulusan serta diambil penguasaan komunikasi yang menitikberatkan pada penguasaan Bahasa terutama komunikasi Bahasa asing yang banyak dibutuhkan DUDI

Untuk meningkatkan target lulusan SMK yang terserap di DUDI berbagai kebijakan dan strategi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sbb :

- a. Memperkuat dan memperluas kemitraan Kerjasama dan pendanaan dari Dunia Usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK untuk magang pada dunia usaha.
- b. Menyesuaikan dan menyelaraskan kurikulum Pendidikan dan standar kelulusan peserta didik sesuai dengan kebutuhan DUDI.
- c. Menerapkan pembelajaran berbasis industri, atau yang dikenal dengan teaching factory. Teaching factory dapat meningkatkan kesiapan kerja lulusan, menyelaraskan kompetensi, dan membentuk karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI.
- d. Meningkatkan kemampuan lulusan peserta didik dengan penguasaan teknologi dan penguasaan Bahasa asing sebagai kemampuan dasar dalam memasuki pasar kerja.
- e. Secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan Pendidikan dan kebutuhan praktek kerja.
- f. Pengembangan dan penguatan program Link and Match dengan dunia usaha dengan mendatangkan tenaga kualifikasi dari dunia industry sebagai transfer ilmu dan pengalaman bagi peserta didik SMK.

Tabel 3.18
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Indikator Sasaran	Tahun 2022 (%)			Tahun 2023 (%)			Tahun 2024 (%)			Target Renstra (%)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Lulusan SMK yg Diterima di IDUKA	63	32.23	51.16	65	38.4	59.08	35	39,86	113,88	45	39,85	88,57	-	-	-

Pada Tabel 3.18 menunjukkan bahwa target serapan lulusan SMK yang bekerja di dunia usaha dan industri mengalami perubahan pada rencana strategis, hal ini dilakukan karena dalam kurun dua tahun (2022-2023) capaian kinerja masih dibawah target. Pada tahun 2024, dengan kondisi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya

serta dengan mempertimbangkan ketersedian anggaran, tenaga pendidik, fasilitas pendidikan serta tingginya minat lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan maka dilakukan penyesuaian target sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2021-2026.

Tabel 3.19
 Analisa Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja
 Lulusan SMK Yang Bekerja di IDUKA Di Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Lulusan SMK yg bekerja di IDUKA	%	35	39,86	113,88	<ol style="list-style-type: none"> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pengelolaan Pendidikan SMK Pengembangan kurikulum Pendidikan dan Kependidikan Pengendalian Perizinan Pendidikan 	695.616.579.023	686.397.864.004	98,67
							143.731.404.700	135.578.222.050	94,33
							405.402.792	331.001.647	81,65
							379.760.000	321.180.012	84,57
							63.630.400	61.758.400	97,06
	Caoaian Kinerja			113,89	Capaian Kinerja Keuangan				91.26
								Tingkat Efisiensi	22.63
								Tingkat Efektivitas	124.79

Pada Tabel 3.19 menjelaskan hubungan antara efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja, persentase realisasi kinerja tercatat pada angka 113,88% dengan penilaian kinerja sangat baik dari dengan realisasi keuangan 91.26%, dengan demikiaan terdapat efisiensi sumber daya 22.63% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program sebesar 124.79%

5. Persentase PTK mengikuti Diklat

Program Pendidikan dan pelatihan guru merupakan program yang dilakukan oleh organisasi yang memiliki akreditasi dengan tujuan menjadi PTK lebih profesional, sehingga dapat memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Program latihan yang dilakukan biasanya mencakup teknik perencanaan pembelajaran dan cara melakukan pembelajaran yang efektif. Kegiatan ini masuk ke dalam bagian internal manajemen di sekolah yang diadakan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru. Pihak manajemen berharap agar guru bisa mendapatkan keunggulan kompetitif serta dapat memberikan pelayanan terbaik. Program pelatihan guru diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dan mengalami peningkatan kualitas kerja

Tabel 3.20
 Analisa Pencapaian Kinerja
 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yg Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
 Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	PTK yang mengikuti Diklat	12,58	14,61	116,14	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.20 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja pendidik dan tenaga Pendidikan (PTK) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terealisasi 14,61 dengan realisasi kinerja 116,14% dengan predikat kinerja **sangat baik**.

Keberhasilan/kegagalan realisasi pencapaian kinerja Pendidik dan PTK yang mengikuti diklat dipengaruhi oleh hal sbb :

- a. Faktor regulasi yang wajibkan PTK memiliki nilai akreditasi minimal untuk mengikuti diklat dalam sasaran kinerja pengawal individu.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana yang memudahkan untuk mengikuti diklat bagi PTK.
- c. Informasi dan jumlah diklat yang mudah didapat sehingga minat untuk mengikuti diklat menunjukkan trend membaik
- d. Fasilitas teknologi informasi yang belum mencakup seluruh wilayah pada satuan Pendidikan menyebabkan sebagian PTK yang berada di wilayah yang belum terjangkau Teknologi informasi mengalami kesulitan untuk mengikuti diklat secara rutin.
- e. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan diklat secara online sangat terbatas untuk dilaksanakan

Beberapa strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilakukan hal sbb :

- a. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pendidik melalui berbagai diklat yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
- b. Pengurangan anggaran biaya untuk diklat secara offline sehingga dapat dilakukan penilaian apakah ada perubahan kemampuan setelah mengikuti diklat.

- c. Memperkuat regulasi dan standar kemampuan PTK
- d. Adanya kebijakan reward and punishment bagi PTK yang berprestasi dan penyegaran wiliyah kerja dengan skema tour of duty.

Tabel berikut mennggambarkan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta capaian kinerja berdasarkan terget Renstra dan target nasional.

Tabel 3.21
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mengikuti Diklat
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Indikator Sasaran	Tahun 2022 (%)			Tahun 2023 (%)			Tahun 2024 (%)			Target Akhir Renstra (%)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
PTK yg mengikuti diklat	na	na	na	na	na	na	12,58	14,61	116,14	12,63	14,61	112,14	-	-	-

Pada Tabel 3.21 menunjukkan bahwa capaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti Pendidikan dan Latihan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan ketrampilan yang bertujuan meningkatnya kualitas proses belajar antara pendidik dan peserta didik.

Indikator Sasaran pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang mengikuti Pendidikan dan Latihan yang merupakan sasaran yang baru ditambahkan pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan 2021-2026, sehingga capaian kinerja tahun sebelumnya belum dapat diuraikan dan dianalisa.

Tabel 3.22
Analisa Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Capaian Kinerja
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi	Capaian Kinerja		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	PTK yang mengikuti Diklat	%	12,58	14,61	116,12	1. Pengembangan Karir PTK SMA 2. Pengembangan Karir PTK SMK 3. Penyusunan Kurikulum Mulok PK 4. Penyusunan Kurikulum Mulok Pendidikan Menengah	524.526.000 792.323.634 66.850.000 338.552.792	114.208.800 291.336.798 65.101.000 265.900.647	21,77 36,77 97,38 78,54
Caoaian Kinerja			116,12		Capaian Kinerja Keuangan			58,62	
									Tingkat Efisiensi 57,52
									Tingkat Efektivitas 198,12

Pada Tabel 3.22 menjelaskan hubungan antara efektivitas dan efesiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja, persentase realisasi kinerja tercatat pada angka 116,12% dengan penilaian kinerja sangat baik dan terdapat efesiensi sumber daya 57,52%, dengan demikian capaian efektivitas program 198,12%

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Meningkatnya Mutu Pendidikan Tahun 2024, di dukung dengan berbagai program dan anggaran sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 3.23
Program dan Dukungan Anggaran
Indikator Kinerja Meningkatnya Mutu Pendidikan
Tahun Anggaran 2024

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
1	Bdang Pendidikan	1.076.236.158.457	1.049.155.642.316	97,48
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	695.616.579.023	689.397.864.004	98,67
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	377.526.999.967	360.106.106.291	95,39
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	219.216.229.867	212.077.643.276	96,44
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.382.435.600	2.333.310.440	97,94
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	947.541.200	932.881.949	98,45
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.022.791.800	1.008.712.407	98,62

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
4	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.022.791.800	7.467.464.513	95,77
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.959.628.513	13.219.358.917	94,70
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.211.545.800	13.977.087.479	98,35
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.558.818.600	2.527.647.311	98,78
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.656.000	141.204.463	93,73
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.336.422.600	1.311.771.780	98,16
10	Pengadaan Mebel Sekolah	9.473.559.360	9.447.070.330	99,72
11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.552.380.000	1.550.440.000	99,88
12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.092.582.539	8.825.195.585	87,44
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3362.969.974	3.352.433.298	99,69
14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	17.594.244.940	16.596.794.225	94,33
15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	695.432.726	667.608.384	96,00
16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.580.331.600	1344.899.000	85,10
17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	524.526.000	114.208.800	21,77
18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	109.224.680.000	196.491.728.141	97,50
19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75.602.000	67.026.000	88,66
20	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	287.501.000	285.827.314	99,42
21	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.397.415680	1.377.992.331	98,61
22	Pembangunan Ruang Laboratorium	8.243.372600	8.098.713.050	98,25
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	4.604.345965	4.543.914.803	98,69
24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.628.231890	5.503.972.157	97,79
25	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	.138.500000	137.708.364	99,43
26	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	161.322.000	85.640.000	53,09
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	143.731.404.700	113.325.764.165	78,85
27	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	7.931.686.317	7.539.037.699	95,05
28	Pembangunan Ruang Laboratorium	4.867.412.000	4.608.257.018	94,68
29	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	167.500.000	164.065.850	97,95
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.917.559.533	5.207.100.943	87,99
31	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	668.426.170	6.069.08..796	90,80
32	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.849.350.900	1.644.631.755	88,93
33	Pengadaan Mebel Sekolah	2.723.349.988	2.691.957.960	98,85

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.466.334.400	4.879.249.500	75,46
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	14.259.336.000	13.522.533.462	94,83
36	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.782.760.370	5.906.159.470	75,89
37	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.965.942.240	1.338.243.000	68,07
38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	234.696.560	206.292.550	87,90
39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	76.947.020.000	76.376.705.181	99,26
40	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.730.600	66.463.400	99,60
41	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	508.350.000	485.598.325	95,52
42	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.541.423.879	5.777.119.186	76,61
43	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	161.714.200	70.194.600	43,41
2.3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.579.365.400	10.818.189.112	74,20
44	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	28.3933.000	278.753.466	98,18
45	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	17.4099.400	171.561.675	98,54
46	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	28.5880.000	284.582.910	99,55
47	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	82.5229.750	547.404.990	66,33
48	Pembangunan Kantin Sekolah	36.7699.850	363.516.433	98,86
49	Pengadaan Mebel Sekolah	17.0000.000	167.595.000	98,59
50	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	67.7000.000	132.781.665	19,61
51	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	31.9090.000	308.114.000	96,56
52	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	39.6700.000	394.751.300	99,51
53	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	25.7479.000	241.106.000	93,64
54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	18.5336.150	108.048.083	58,30
55	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	9.398.200.000	9.352.366.793	99,51
56	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.9761.600	43.142.900	86,70
57	Pembangunan Ruang Kelas Baru	633.120.000	620.646.900	98,03
58	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	80.426.650	70.864.559	88,11
59	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	475.410.000	472..313.464	99,35
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	405402792	331.001.647	81,65
60	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	338552792	265.900.647	78,54

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			
61	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	66850000	65.101.000	97,38
62	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	66.850.000	65.101.000	97,38
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	379.760.000	321.180.012	84,57
63	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	200.000.000	150.730.312	75,37
64	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	179.760.000	170.449.700	94,82
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	63.630.400	61.758.400	97,06
65	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200	44.639.000	97,65
66	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200	44.639.000	97,65
67	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200	17.119.400	95,54
68	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200	17.119.400	95,54
	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.243.786.275	1.938.101.960	86,38

3.1.3.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan

Akses pendidikan adalah kemudahan yang diberikan negara kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan kemudahan mengikuti program pendidikan. Akses pendidikan yang baik penting karena pendidikan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting untuk pengembangan diri dan masa depannya

Capaian indicator sasaran 2 terdiri atas 4 indikator sasaran, indicator sasaran pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 sbb :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMA/MA/SMK

2. Angka Parisipasi Murni (APM) SMA/SMK
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
4. Rasio siswa perkelas SMA/MA/SMK/MAK

Berikut capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan dengan 4 indikator sasaran sebagaimana pada grafik berikut

Tabel 3.24
Analisa Pencapaian Kinerja Meningkatnya Akses Pendidikan
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99	108,45	109,55	Sangat Baik	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	80	87,94	109,93	Sangat Baik	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	87,00	117,98	135,61	Sangat Baik	
	Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	1:23	153,1	Sangat Baik	

Berikut pencapaian sasaran strategis 1 pada tahun 2024 beserta eviden pendukung dan penjelasannya sbb :

1. Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur (SMA/MA/SMK Usia 16-18 Tahun) yang sesuai dengan jenjang pendidikan, semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK tahun 2024 sebesar 97.03% Dari target 99 atau capaian kinerja sebesar 98.01%, data menunjukan bahwa 97.03% penduduk usia sekolah sudah bersekolah di tingkat SMA/MA/SMK. Pada tahun 2024 jumlah penduduk usia 16-18 tahun tercatat sebanyak 107.064 jiwa, sementara itu jumlah penduduk yang sudah bersekolah pada tingkat SMA/MA/SMK pada tahun 2024 yaitu sekitar 103.923 siswa yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota, ini termasuk usia di

atas dan di bawah usia 16-18 tahun.

Jika dilihat dari jumlah penduduk usia sekolah, kondisi ini sudah baik dimana Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai 97.03% yang artinya seluruh penduduk usia sekolah sudah mendapatkan pendidikan dengan baik sesuai dengan usia sekolah nya dan terdapat sedikit selisih antara jumlah siswa dan penduduk usia sekolah, hal ini karena masih banyak nya siswa yang berada dibawah atau diatas usia pendidikan yang duduk di bangku sekolah. Untuk Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK) per Kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 3.25
Analisa Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran
Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99	108.45	109.55	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.25 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK masih dibawah dari target, pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 108.45% dengan persentase capaian kinerja 109.55% dengan peringkat kinerja **sangat baik**.

Tabel berikut mennggambarkan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya serta capaian kinerja berdasarkan terget Renstra dan target nasional.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

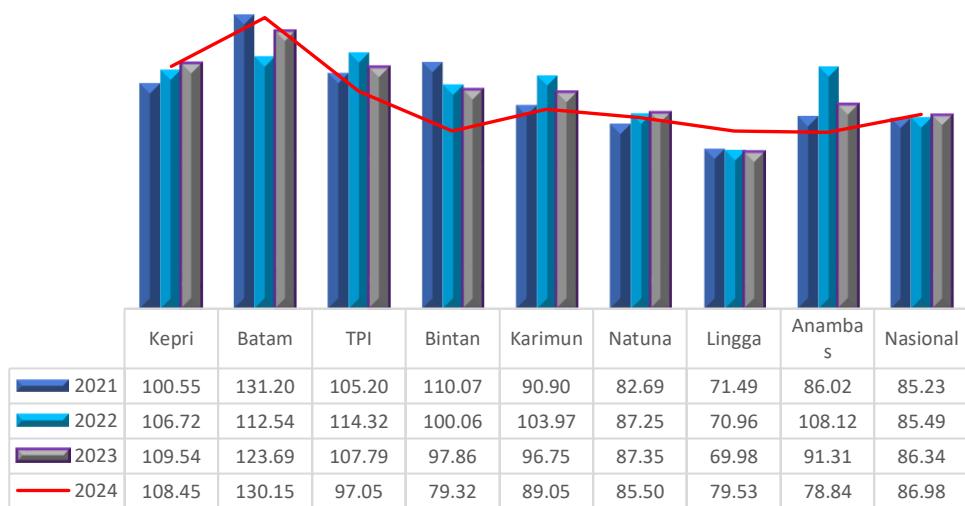
No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK	Jumlah Siswa MA	Jumlah Siswa	Jumlah Pendudk (16-18 Thn)	APK (%)
1.	Batam	58.804	2.758	61.562	47.299	130,15
2.	Tanjungpinang	11.885	473	12.358	12.734	97,05

3.	Bintan	7.273	610	7.883	9.938	79,32
4.	Karimun	11.115	529	11.644	13.076	89,05
5.	Natuna	3.641	486	4.127	4.827	85,50
6.	Lingga	3.995	134	4.129	5.192	79,53
7.	Anambas	2.015	161	2.176	2.760	78,84
	Kepulauan Riau	98.728	5.151	103.879	95.826	108,45

Sumber : Dapodik dan Dinas PM dan Dukcapil Kepri 2024

Dari Tabel 3.26 dapat disimpulkan bahwa pencapaian APK tertinggi ada di Kota Batam, ini menjelaskan bahwa penduduk Kota Batam berusia antara 16-18 tahun sudah melebihi 100% yang sudah bersekolah dan APK terendah yaitu Kabupaten Anambas dengan capaian kinerja 78,84 persen penduduk usia sekolah yang bersekolah di tingkat Sekolah Menengah. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Anambas bisa di sebabkan oleh penduduk usia sekolah yang terdaftar di Kabupaten Anambas namun mereka bersekolah di luar Kabupaten Lingga. Berikut Perbandingan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dibawah ini

Grafik 3.16
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021- 2024



Tabel 3.27
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Patisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Indikator Sasaran	Tahun 2022 (%)			Tahun 2023 (%)			Tahun 2024 (%)			Target Renstra (%)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
APK SMA/MA/SMK	98	106,72	108,89	98,5	109,54	111,20	99	108,45	109,55	100	108,45	108,45	-	-	

Tabel 3.28
Analisa Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APK SMA/MA/SMK
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan						
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%				
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	99	108,45	109.55	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidik dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023	686.397.864.004	98,67				
							377.526.999,967	360.106.222.538	95,39				
							405.402,792	331.001.647	81,65				
							379.760,000	321.180,012	84,57				
Caoaan Kinerja			109,55		Capaian Kinerja Keuangan		63.630.400	61.758,400	97,06				
									97,48				
									Tingkat Efisiensi				
									12.07				
									Tingkat Efektivitas				
									112.38				

Pada Tabel 3.28 menjelaskan hubungan antara efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas kinerja, persentase capaian kinerja tercatat pada angka 109,55% dengan penilaian kinerja sangat baik , serta dengan realisasi keuangan 97,48%. Dengan demikian terdapat efisiensi sumberdaya sebesar 12.07% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program 112.38%.

2. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu SMA sederajat. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100%, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

APM SMA/MA/SMK ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 78.71% Dengan demikian persentase capaian kinerja sebesar 98.39%. Untuk meningkatkan APK, APM dapat dilakukan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di sekolah-sekolah yang membutuhkan, dan juga Kota yang sudah tidak bisa menampung tamatan SMP/MTs seperti kota Batam dan kota Tanjung Pinang..

Tabel 3.29
Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

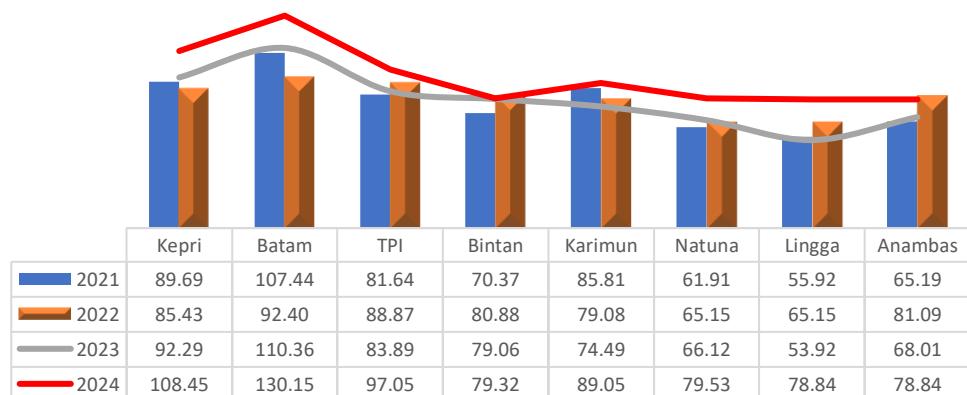
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses Pendidikan	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	80	87.94	109.93	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.30 menjelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK melebihi dari target, pada tahun 2024 realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 87.94% dengan persentase capaian kinerja 109.93% dengan peringkat kinerja **sangat baik**.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK (16-18 Thn)	Jumlah Siswa MA (16-18 Thn)	Jumlah Siswa (16-18 Thn)	Jumlah Pendudk (16-18 Thn)	APM (%)
1.	Batam	48.877	2.113	50.990	47.299	107,80
2.	Tanjungpinang	9.450	333	9.783	12.734	76,83
3.	Bintan	6.023	478	6.501	9.938	65,42
4.	Karimun	8.598	385	8.983	13.076	66,70
5.	Natuna	2.833	337	3.170	4.827	65,67
6.	Lingga	3.076	105	3.181	5.192	61,27
7.	Anambas	1.547	118	1.665	2.760	60,33
	Kepulauan Riau	80.404	3.869	84.273	95.826	87,94

Grafik 3.17
Realisasi Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021- 2024



Tabel 3.31
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Patisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022 (%)			Tahun 2023 (%)			Tahun 2024 (%)			Target Renstra (%)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
APM SMA/MA/SMK	78	85,43	109,52	79	92,29	116,82	80	78,71	98,39	82	78,71	95,99	100	78,39	78,71

Tabel 3.32
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APM SMA/MA/SMK
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan				
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%		
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	80	87,94	109,27	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidik dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023	686.397.864.004	98,67		
							377.526.999,967	360.106.222,538	95,39		
							405.402,792	331.001,647	81,65		
							379.760,000	321.180,012	84,57		
							63.630.400	61.758,400	97,06		
			Capaian Kinerja Keuangan						97,48		
			109,93						Tingkat Efisiensi		
									12,45		
									Tingkat Efektivitas		
									112,77		

Pada Tabel 3.32 menjelaskan analisa antara efektivitas dan efisiensi capaian kinerja dan efektivitas program, persentase realisasi kinerja tercatat pada angka 98,39% dengan penilaian kinerja baik, dengan realisasi keuangan 97,48%. Dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 12,45% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program 112,77%

6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB

APK SLB adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Luar Biasa (SLB). APK SLB merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk berkebutuhan khusus di suatu jenjang pendidikan. APK SLB dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu/khusus dengan jumlah penduduk berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. SLB adalah lembaga pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus.

Tabel 3.33
Analisa Pencapaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar SLB (APK SLB)
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SLB (APK SLB)	87	117,98	135,61	Sangat Baik

Tabel 3.33 menyimpulkan bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB, pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023, dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 97,74 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 97,74.. Untuk sebaran per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 3.37 berikut ini :

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SLB	Jml Pendudk Disabilitas (4-18 Thn)	APK
1.	Batam	719	525	136,95
2.	Tanjungpinang	384	321	119,63
3.	Bintan	141	154	91,56
4.	Karimun	391	321	121,81
5.	Natuna	64	110	58,18
6.	Lingga	50	123	40,65
7.	Anambas	16	35	45,71
	Kepulauan Riau	1.765	1496	117,98

Grafik 3.18
Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022 - 2024



Tabel 3.35
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022 (%)			Tahun 2023 (%)			Tahun 2024 (%)			Target Renstra (%)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
APK SLB	78	82,35	105,57	79	97,74	123,72	87	117,98	135,61	90	117,98	131,08	-	-	-

Tabel 3.36
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja APK SLB
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	87	117,98	135,61	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan SLB 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidik dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023	686.397.864.004	98,67
							14.579.365.400	12.450.240.964	85,40
							405.402.792	331.001.647	81,65
							379.760.000	321.180.012	84,57
	Capaian Kinerja			135,61			63.630.400	61.758.400	97,06
								Capaian Kinerja Keuangan	89,47
								Tingkat Efisiensi	46,14
								Tingkat Efektivitas	157,83

Pada Tabel 3.36 menjelaskan Analisa tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB, persentase realisasi capaian kinerja tercatat pada angka 135,61 dengan penilaian kinerja sangat baik dengan realisasi keuangan 89.47%. Dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 46.14% dan pencapaian tingkat efektivitas capaian program 157.15%

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK, Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Kasar SLB disebabkan beberapa faktor sbb :

- a. Meningkatnya sebaran dan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan menengah yang semakin membaik di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta di dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan pendidikan yang lebih mendekatkan fasilitas pendidikan di tengah masyarakat bertempat tinggal.
- b. Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik serta penyebaran pendidik yang lebih merata pada semua wilayah.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan bagi masa depan anak.
- d. Pembebasan biaya Pendidikan bagi seluruh peserta didik pada satuan Pendidikan sehingga berdampak terhadap menurunkan pengeluaran masyarakat pada sector pendidikan.
- e. Meningkatkan berbagai program untuk menekan permasalahan angka putus sekolah dan anak tidak sekolah melalui berbagai skema seperti skema pendidikan paket A, B dan C serta pendampingan phycsologi bagi anak yang bermasalah social dengan melibatkan organisasi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, organisasi Kesehatan Ahli Jiwa dan berbagai organisasi lainnya.
- f. Skema beasiswa disiapkan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- g. Masih terjadi kesenjangan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada daerah yang jauh dari pusat pelayanan pemerintah dan daerah yang berada di perbatasan dan pulau-pulau terluar

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah sebagai berikut :

- a. Meningkat fasilitas Pendidikan menengah hingga ke seluruh wilayah terutama pada daerah terluar, tertinggal dan wilayah perbatasan sehingga kesenjangan fasilitas Pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin membaik.
- b. Peningkatan alokasi anggaran Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Pendidikan sesuai kebutuhan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan bakat, minat dan percepatan proses pembelajaran berbasis konten-konten Pendidikan yang lebih menarik.
1. Memperkuat program teknologi informasi serta penguatan peran dan fungsi Lembaga/Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Lembaga yang mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi.

6. **Rasio Siswa Perkelas SMA/SMK/MA**

Rasio siswa dengan kelas yang lebih rendah dapat memberikan manfaat bagi prestasi siswa, baik secara akademik, sosial, dan emosional. Rasio siswa-ruang kelas adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan ruang kelas di suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah beberapa standar terkait rasio siswa-ruang kelas, luas minimum ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, ditentukan aturan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombel. Untuk SD, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Untuk SMP, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 32 peserta didik. Untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah

paling sedikit 15 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak lima peserta didik. Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dalam satu kelas berjumlah paling banyak delapan peserta didik. Untuk menghitung rasio dimaksud, berikut data pendukung sbb :

Tabel 3.37
Jumlah Siswa dan Ruang Kelas Belajar
di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Kab/Kota	Jumlah Siswa SMA/SMK/	Jumlah Siswa MA	Jumlah Siswa	Jumlah RKB SMA/SMK/	Jumlah RKB MA	Jml RKB	Rasio (%)
1.	Batam	58.804	2.758	61.562	2.164	165	2.329	26,4
2.	Tanjungpinang	11.885	473	12.358	452	24	476	25,9
3.	Bintan	7.273	610	7.883	329	40	369	21,3
4.	Karimun	11.115	529	11.644	533	52	585	19,9
5.	Natuna	3.641	486	4.127	222	39	261	15,8
6.	Lingga	3.995	134	4.129	225	17	242	17,1
7.	Anambas	2.015	161	2.176	132	13	145	15,1
	Kepulauan Riau	98.728	5.151	103.923	4.057	350	4.407	23,5

Sumber : Dapodik 2024

Tabel 3.38 dibawah Menyimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja realisasi kinerja Rasio Siswa Perkelas pada tahun 2024 melebihi dari target yaitu pada ralisanasi 1 : 23,5 dengan persentase capaian kinerja 153,19% dengan kriteria penilaian kinerja **Sangat Baik**.

Tabel 3.38
Analisa Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
	Meningkatnya Akses pendidikan	Rasio siswa perkelas	1:36	1:23,5	153,19	Sangat Baik

Keberhasilan capaian kinerja rasio siswa perkelas dipengaruhi oleh hal sbb :

1. Menurunnya tingkat kesenjangan fasilitas Pendidikan dan semakin membaiknya ketersedian dan penyebaran fasilitas pendidikan di setiap kab/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta strategi pendekatan layanan Pendidikan yang lebih mendekatkan pada masyarakat..
2. Penyebaran fasilitas pendidikan yang semakin merata antar kabupaten/kota serta di dukung fasilitas pendidikan yang kondis kelas yang semakin mebaik.
3. Dukungan dari pihak swasta dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan.
4. Regulasi penerimaan siswa yang disebar secara merata antar wilayah melalui sistim penerimaan peserta didik yang lebih transparans dan berkeadilan.
5. Meningkatnya mutu, jumlah dan distribusi PTK yang lebih merata pada satuan Pendidikan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan berbagai strategi untuk mempertahankan keberhailan dan meningkatkan rasio siswa perkelas dengan strategi sbb :

1. Menyediakan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan merata antar wilayah.
2. Meningkatkan peranan dan mempermudah regulasi serta pengawasan yang ketat terhadap fasilitas dan mutu pendidikan swasta.
3. Menyediakan fasilitas dukungan anggaran, pembinaan PTK dan pengawasan proses belajar mengajar pada semua fasilitas pendidikan swasta yang disesuaikan dengan standar dan mutu pendidikan.

Tabel 3.39
Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Siswa Perkelas
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Tahun 2022 (%)			Tahun 2023 (%)			Tahun 2024 (%)			Target Renstra (%)			Target Nasional		
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Rasio Siswa Perkelas	1:36	1:27,22	133	1:36	1:26,42	128	1:36	1:23,5	153,1	1:36	1:23,5	153,1	-	-	-

Tabel 3.40
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Sasaran Kinerja Rasio Siswa Perkelas
Di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Rasio Siswa Perkelas	Rasio	1:36	1:23,5	153,1	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidik dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023 377.526.999,967 405.402.792 379.760.000 63.630.400	686.397.864.004 360.106.222.538 331.001.647 321.180.012 61.758.400	98.67 95,39 81,65 84,57 97,06
	Capaian Kinerja			136,61				Capaian Kinerja Keuangan	97,48
								Tingkat Efisiensi	55,71
								Tingkat Efektivitas	157,15

Pada Tabel 3.40 menjelaskan Analisa tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja rasio siswa perkelas, persentase realisasi capaian kinerja tercatat pada angka 136.61% dengan penilaian kinerja sangat baik dengan realisasi keuangan 97.48%. Dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya 55,71% dengan efektivitas capaian program 157.15%

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2024, di dukung dengan berbagai program dan anggaran sebagaimana pada table dibawah ini :

Tabel 3.41
Program dan Dukungan Anggaran
Indikator Kinerja Meningkatnya Mutu Pendidikan
Tahun Anggaran 2024

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
1	Bdang Pendidikan	1.076.236.158.457	1.049.155.642.316	97,48
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	695.616.579.023	689.397.864.004	98,67
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	377.526.999.967	360.106.106.291	95,39
2.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	219.216.229.867	212.077.643.276	96,44
1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.382.435.600	2.333.310.440	97,94
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	947.541.200	932.881.949	98,45
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.022.791.800	1.008.712.407	98,62
4	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.022.791.800	7.467.464.513	95,77
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.959.628.513	13.219.358.917	94,70
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.211.545.800	13.977.087.479	98,35
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.558.818.600	2.527.647.311	98,78
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150.656.000	141.204.463	93,73
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.336.422.600	1.311.771.780	98,16
10	Pengadaan Mebel Sekolah	9.473.559.360	9.447.070.330	99,72
11	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.552.380.000	1.550.440.000	99,88
12	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10.092.582.539	8.825.195.585	87,44
13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	3362.969.974	3.352.433.298	99,69
14	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	17.594.244.940	16.596.794.225	94,33
15	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	695.432.726	667.608.384	96,00

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
16	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.580.331.600	1344.899.000	85,10
17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	524.526.000	114.208.800	21,77
18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	109.224.680.000	107.400.815.981	98,33
19	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	75.602.000	67.026.000	88,66
20	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	287.501.000	285.827.314	99,42
21	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.397.415680	1.377.992.331	98,61
22	Pembangunan Ruang Laboratorium	8.243.372600	8.098.713.050	98,25
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	4.604.345965	4.543.914.803	98,69
24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.628.231890	5.503.972.157	97,79
25	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	.138.500000	137.708.364	99,43
26	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	161.322000	85.640.000	53,09
2.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	143.731.404.700	113.325.764.165	78,85
27	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	7.931.686.317	7.539.037.699	95,05
28	Pembangunan Ruang Laboratorium	4.867.412.000	4.608.257.018	94,68
29	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	167.500.000	164.065.850	97,95
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.917.559.533	5.207.100.943	87,99
31	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	668.426.170	6.069.08..796	90,80
32	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.849.350.900	1.644.631.755	88,93
33	Pengadaan Mebel Sekolah	2.723.349.988	2.691.957.960	98,85
34	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.466.334.400	4.879.249.500	75,46
35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	14.259.336.000	13.522.533.462	94,83
36	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.782.760.370	5.906.159.470	75,89
37	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.965.942.240	1.338.243.000	68,07
38	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	234.696.560	206.292.550	87,90
39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	76.947.020.000	76.594.943.386	99,54
40	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.730.600	66.463.400	99,60
41	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	508.350.000	485.598.325	95,52
42	Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.541.423.879	5.777.119.186	76,61
43	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	161.714.200	70.194.600	43,41
2.3	Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.579.365.400	10.818.189.112	74,20

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
44	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	28.3933.000	278.753.466	98,18
45	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	17.4099.400	171.561.675	98,54
46	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	28.5880.000	284.582.910	99,55
47	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	82.5229.750	547.404.990	66,33
48	Pembangunan Kantin Sekolah	36.7699.850	363.516.433	98,86
49	Pengadaan Mebel Sekolah	17.0000.000	167.595.000	98,59
50	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	67.7000.000	132.781.665	19,61
51	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	31.9090.000	308.114.000	96,56
52	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	39.6700.000	394.751.300	99,51
53	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	25.7479.000	241.106.000	93,64
54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	18.5336.150	108.048.083	58,30
55	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	939.8200.000	9.352.366.793	93,64
56	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4.9761.600	43.142.900	86,70
57	Pembangunan Ruang Kelas Baru	633.120.000	620.646.900	98,03
58	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	80.426.650	70..864.559	88,11
59	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	475.410.000	472..313.464	99,35
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	405402792	331.001.647	81,65
60	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	338552792	265.900.647	78,54
61	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	66850000	65.101.000	97,38
62	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	66.850.000	65.101.000	97,38
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	379.760.000	321.180.012	84,57
63	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	200.000.000	150.730.312	75,37
64	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	179.760.000	170.449.700	94,82
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	63.630.400	61.758.400	97,06

No	Bidang Urusan/Pemerintahan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
65	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200	44.639.000	97,65
66	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	45.711.200	44.639.000	97,65
67	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200	17.119.400	95,54
68	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	17.919.200	17.119.400	95,54
	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.243.786.275	1.938.101.960	86,38

3.1.3.2.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dapat diwujudkan melalui pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dijabarkan dalam kegiatan LAKIP dan Kinerja Indikator Utama, kedua alat ukur tersebut mencerminkan pencapaian secara umum hasil kinerja yang diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. IKU merupakan prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA. Penetapan IKU bertujuan untuk Mendapatkan informasi kinerja yang penting untuk menyelenggarakan manajemen kinerja dan memperoleh ukuran keberhasilan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut pencapaian Nilai SAKIP dan capaian kinerja indicator kinerja utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan riau Tahun 2024 sbb :

1. Persentase Kinerja IKU Dinas Pendidikan

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu organisasi, unit kerja, atau individu dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja kualitas dan efektivitas organisasi perangkat daerah merupakan capaian kinerja secara keseluruhan dengan penilaian akhir pada capaian kinerja akhir periode berjalan. Pengukuran ini membandingkan berapa banyak capaian kinerja program yang mencapai target dan menganalisa capaian kinerja dengan membandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan.

Pengukuran kinerja Indikator Utama menggambarkan seberapa besar capaian kinerja secara keseluruhan, hal ini menunjukkan nilai keberhasilan organisasi mencapai target kinerja yang didukung dengan personil yang tersedia, anggaran yang digunakan dan strategi yang tepat digunakan dalam pencapaian kinerja. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sbb

Tabeln 3.42
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
I	Meningkatnya mutu pendidikan	SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	83	81,25	97,89	Baik
		Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,22	97,36	100,14	Sangat Baik
		Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	33	35,59	107,85	Sangat Baik
		Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	35	39,86	113,88	Sangat Baik
		Persentase PTK mengikuti Diklat untuk	12,58	14.20	113,88	Sangat Baik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja
		peningkatan kompetensi				
Meningkatnya Akses pendidikan		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99	108,45	109,55	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	80	87,42	109,27	Sangat Baik
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	87,00	117,98	135,61	Sangat Baik
		Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	1:23,5	153,10	Sangat Baik
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Percentase capaian IKU Dinas Pendidikan	91,5	9	115,94	Sangat Baik

2. Capaian Efisiensi Kinerja dan Capaian Program Dinas Pendidikan

Efisiensi sumber daya anggaran adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin, efisiensi sumber daya anggaran bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan organisasi. Efisiensi sumber daya anggaran penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara optimal. Efisiensi sumber daya anggaran dapat meningkatkan hasil penggunaan anggaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat

Pencapaian kinerja atau pencapaian program merupakan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau pencapaian target yang telah disepakaiti sebelumnya, pencapaian kinerja mencerminkan kemampuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Sumber daya berkaitan erat dengan target yang ditentukan, efisiensi sumber daya yang seminimal mungkin memerlukan strategi dalam pencapaian target kinerja.

Tabel 3.43
 Analisa Tingkat Efesiensi Sumber Daya dan Efektivitas Program
 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
 Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
			Target (%)	Realisasi (%)	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	%	91,5	10	116.02	1. Program Penunjang Urusan pemerintah provinsi 2. Pengelolaan Pendidikan 3. Pengembangan kurikulum 4. Pendidik dan Kependidikan 5. Pengendalian Perizinan Pendidikan	695.616.579.023 377.526.999.967 405.402.792 379.760.000 63.630.400	663.443.797.702 357.186.005.919 331.001.647 321.180.012 61.758.400	95,37 95,46 81,65 84,57 97,06
Capaian Kinerja			116.02		Capaian Kinerja Keuangan			97.48	
									Tingkat Efisiensi 21.45
									Tingkat Efektivitas 122.83

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi sumber daya dan efektivitas program yang dijabarkan pada Tabel 3.43 dapat disimpulkan bahwa, capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang terdiri dari **9 indikator** mencapai 116.02% yang terdiri **1 indikator** dengan penilaian kinerja **BAIK** dan **8 Indikator** kinerja dengan penilaian **SANGAT BAIK**.

Capaian tingkat efisiensi sumber daya berada pada angka 24.86%, capaian ini menunjukan bahwa dilakukan penghematan sumber daya/anggaran sebesar 21.45% untuk mencapai capaian kinerja 116.02% dan pencapaian efektivitas program 122.83%

Tabel 3.43
Analisis Perbandingan Indikator Kinerja Program
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022-2024

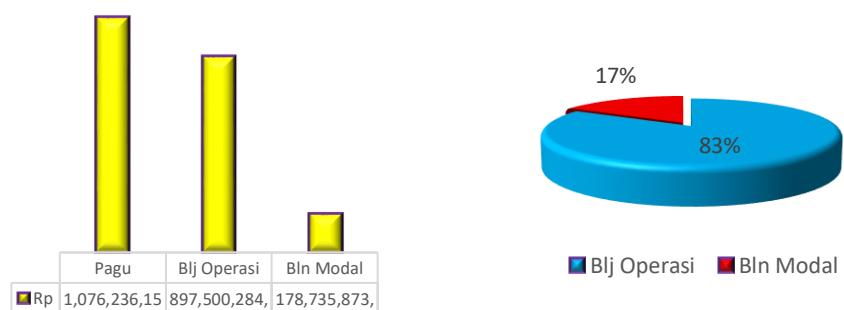
No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Tahun 2022 (%)			Tahun 2023 (%)			Tahun 2024 (%)			Target Akhir Renstra (%)			Target Nasional		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	100	84,54	84,54	100	84,97	84,97	100	85,56	85,56	100	85,56	85,56	100	85,56	85,56
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98	106,72	108,89	98,5	109,54	111,20	99	108,45	109,55	100	109,54	109,54	95	86,98	92,02
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	78	82,35	105,57	79	92,29	116,82	87	117,98	136,61	90	117,98	131,08	-	-	-
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	%	78	85,43	109,52	79	92,29	116,82	80	87,42	109,27	82	87,42	106,61	100	87,42	87,42
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,38	0,08	178,01	0,37	0,06	200	0,36	0,014	196,2	0,34	0,014	195,8	-	-	-
6	Ruang Kelas SMA/SMK/SLB Kondisi Baik	%	95,54	99,97	104,21	96,11	95,43	99,29	96,27	95,38	99,07	96,44	95,38	98,91	-	-	-
7	Angka Melanjutkan (AM) SMP ke SMA/SMK/MA	%	97,43	99,93	102,57	99,08	100,88	101,82	100	108,4	108,4	100	108,4	108,4	100	108,4	108,4
8	Rasio ketersedian sekolah thd penduduk usia sekolah	Rasio	33,75	33,16	98,25	33,80	35,91	106,24	33,85	34,95	103,95	33,95	34,95	102,94	-	-	-
9	Nilai Literasi Minimum	%	60	67,28	112,13	60,50	70,58	116,66	61	69,06	113,21	62	69,06	111,38	-	-	-
10	Nilai Numerasi Minimum	%	30	40,68	135,6	30,50	53,34	178,16	31	60,54	195,29	32	60,54	189,18	-	-	-
11	SMKN yg terevitalisasi	%	24,32	97,22	379,1	27,03	97,22	359,6	97,22	97,36	100,1	97,37	97,36	99,98	-	-	-
12	Rasio guru SMA/SMK terhadap murid sekolah menengah	Rasio	724,76	644,92	88,98	726	672,21	92,47	728,07	618,75	84,98	730	618,75	84,75	-	-	-
13	SMA/SMK /SLB swasta yg memperoleh izin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

3. Kinerja Anggaran

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai salah satu instrumen penganggaran berbasis Kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas, fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola oleh satuan kerja bersangkutan. Fungsi ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan, penyusunan reviu angka dasar, penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan.

Pada tahun 2024, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tercatat 1.076.236.158.457 terdiri atas belanja operasi sebesar 897,500,284,475 atau setara dengan 83,39% dan belanja modal sebesar 178,735,873,982 atau setara dengan 16,61%. Realisasi belanja 1.023.281.846.640 dengan capaian realisasi belanja 95.08%. Berikut alokasi anggaran dan realisasi pada tahun 2024 sbb :

Grafik 3.19
Jenis Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024



Tabel 3.44
Program dan Dukungan Anggaran
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu Anggaran		
		APBDP	Realisasi	%
I	DINAS PENDIDIKAN	1.076.236.158.457	1.049.155.642.316	97,48
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	695.616.579.023	686.397.864.004	98,67
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	377.526.999.967	360.106.106.291	95,39
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	405402792	330.631.647.	81,56
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	379.760.000	321.180.012	84,57
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	63.630.400	61.758.400	97,06
6	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2.243.786.275	1.938.101.960	86,38

BAB IV **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pemenuhan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai terhadap pertanggungjawaban keuangan dan capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2021- 2026.

Pada tahun 2024, anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tercatat 1.076.236.158.457 terdiri atas belanja operasi sebesar 897,500,284,475 atau setara dengan 83,39% dan belanja modal sebesar 178,735,873,982 atau setara dengan 16,61%. Realisasi anggaran pada tahun 2024 tercatat pada angka 1.049.155.642.316 dengan capaian realisasi belanja 97.48%.

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja telah mencapai 115,94%, beberapa capaian kinerja dengan predikat sangat baik meliputi Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi dengan capaian kinerja 100,14%. Selanjutnya lulusan SMK yang bekerja di DUDI capaian kinerja 113,88%, PTK yang mengikuti diklat dengan realisasi kinerja 112,87, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dengan realisasi kinerja 109,27. Berikutnya capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA pada tahun 2024 mencapai 135,61%. Selanjutnya secara lengkap capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan dijelaskan pada grafik berikut :

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Peringkat Kinerja	Sumber daya dan Program	
							Efesiensi (%)	Efektivitasi (%)
I	Meningkatnya mutu pendidikan	1. SMA/SMK/SLB Negeri yang terakreditasi min B	83	81,25	97,89	Baik	0.41	100.42
		2. Sekolah SMK Negeri Terevitalisasi	97,22	97,36	100,14	Sangat Baik	8.88	109.73
		3. Tingkat lulusan SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi/kedinasan	33	35,59	107,85	Sangat Baik	16.11	117.56
		4. Tingkat penyerapan lulusan SMK yang bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Kerjas (IDUKA)	35	39,86	113,88	Sangat Baik	22.63	124.79
		5. Persentase PTK mengikuti Diklat untuk peningkatan kompetensi	12,58	14.61	116,14	Sangat Baik	18.86	119,14
	Meningkatnya Akses pendidikan	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	99	108,45	109,55	Sangat Baik	12.07	112.38
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK	80	87,94	109,93	Sangat Baik	12.45	112.38
		8. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	87,00	117,98	135,61	Sangat Baik	12,45	112.77
		9. Rasio Siswa Perkelas SMA/MA/SMK/MAK	1:36	1:23,5	153,19	Sangat Baik	55.71	157.15
		10. Persentase capaian IKU Dinas Pendidikan	91,5		116,02	Sangat Baik	21.45	122.83

Beberapa Langkah strategis yang akan dilakukan pada masa mendatang untuk meningkatkan capaian kinerja sbb :

1. Pemerataan fasilitas dan sarana pendidikan antar wilayah dan antar satuan Pendidikan.
2. Pemenuhan dan pemerataan kualitas pendidik serta distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
3. Peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi guru produktif antar wilayah dan antar satuan pendidikan.
4. Penyelarasan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan perkembangan.

5. Peningkatan dan pemerataan pembelajaran berbasis media plafon digital dengan Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
6. Memperkuat dan memperluas kemitraan Kerjasama dan pendanaan dari Dunia Usaha untuk memberi ruang yang lebih fleksibel bagi peserta didik SMK untuk magang pada dunia usaha.
7. Meningkatkan program pembelajaran berbasis industri (teaching factory) untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan, menyelaraskan kompetensi, dan membentuk karakter kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI.
8. Pengembangan dan penguatan program Link and Match dengan dunia usaha dengan mendatangkan tenaga kualifikasi dari dunia industry sebagai transfer ilmu dan pengalaman bagi peserta didik SMK.
9. Reward dan punishment bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja baik.

